



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA dan PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa	:	II
Persidangan	:	
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (BINAPENTA NAKER) Kementerian Ketenagakerjaan RI</li><li>2. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (BINALATTAS) Kementerian Ketenagakerjaan RI.</li></ol>
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 para Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 09 Februari 2015
Waktu	:	09.00 WIB – Selesai
Tempat	:	R.Rapat Komisi IX DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri S, M.Sc
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE
Hadir	:	41 Anggota

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Ermalena, MHS (F.PPP)

**F.PDIP :**

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP.,MM
8. Ir. Ketut Sustiawan
9. Daniel Lumban Tobing
10. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
11. Nursuhud
12. Abidin Fikri, SH
13. dr. Karolin Margret Natasa

**F.PG :**

14. Hj. Saniatul Lativa, SE
15. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
16. dr. Charles J. Mesang
17. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
18. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

**F.P.GERINDRA :**

19. Khaidir
20. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
21. drg. Putih Sari
22. Roberth Rouw.

**F.PD :**

23. Drs. H. Zulfikar Achmad
24. Siti Mufattahah, Psi.
25. Drs. Ayub Khan.
26. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

**F.PAN :**

27. Ir. H.A. Riski Sadig
28. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum

**F.PKB :**

29. H. Marwan Dasopang
30. H. Handayani, SKM
31. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
32. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

**F.PKS :**

33. Ansory Siregar, Lc
34. Drs, H. Chairul Anwar, Apt
35. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM

**F.PPP :**

36. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
37. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si

**F.P.NASDEM :**

- 38. Irma Suryani Chaniago, SE
- 39. Ir. Ali Mahir, MM
- 40. Amelia Anggraini

**F.P. HANURA :**

- 41. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

**ANGGOTA IZIN / SAKIT :**

-

**UNDANGAN :**

- 1. Dr. Dra. Reyna Usman, MM (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker RI) beserta jajaran
- 2. Ir. Khairul Anwar, MM (Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI) beserta jajaran

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.45 WIB**

**KETUA RAPAT (F-PG/H. SYAMSUL BACHRI S,M.Sc) :**

*Bissmillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita semua.  
Selamat pagi.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang terhormat Ibu Dirjen Bina Penta dan Bapak Dirjen Lattas  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.**

Pada pagi hari ini sesuai dengan *schedule* yang telah ditetapkan kita akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut dari Raker beberapa waktu yang lalu bahwa Komisi IX DPR RI dan Eselon I akan melakukan pendalaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh Menteri pada saat Raker.

**Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.**

Sampai saat ini Anggota yang sudah menandatangani absensi 10 orang dari 5 Fraksi, karena undangan kami jam 9 maka RDP ini kita buka dan kita skors kembali untuk beberapa saat menunggu beberapa Anggota dan supaya tidak menyalahi aturan kuorum dari rapat ini. Untuk itu RDP kami buka dan kita skors beberapa saat.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB)**

Skorsing telah ditandatangani dari 16 Anggota dan 8 Fraksi, jadi fraksi sudah kuorum, oleh karena itu RDP ini bisa kita mulai dan pengambilan kesimpulan atau keputusan akan tetap kita lakukan pada saat kuorum baik fraksi maupun anggota. Dengan demikian skorsing saya cabut kembali.

**(SKORS DICABUT)**

**Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,**

RDP ini kita targetkan selesai Pukul 12.00 WIB dan mudah-mudahan tidak molor karena jam 4 ada Rapat Paripurna yang cukup padat materinya sehingga kami harap pada Bapak, Ibu sekalian pembicara nanti kita efisienkan, demikian pula nanti presentase dari Dirjen mungkin nanti bisa dipadatkan dan fokus penjelasannya lebih utamakan ke RAPBN untuk Tahun 2015, hal-hal lain yang tertulis disini mungkin sifatnya *highlight* saja. Baik, pertama-tama, kami persilakan siapa yang duluan? Mungkin Bina Penta dulu kami persilakan.

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat untuk kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan program Direktorat Jenderal Bina Penta Naker yang sebelumnya adalah Dirjen Bina Penta karena ada perubahan nomenklatur maka Dirjen Bina Penta diberikan tugas dan fungsi untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk itu, kami akan menyampaikan pokok bahasan pada hari ini adalah berkaitan dengan pendahuluan, kemudian struktur kelembagaan dan nomenklatur program kemudian penyerapan anggaran dan postur anggaran Direktorat Jenderal Bina Penta Naker dan rencana capaian program dan kegiatan Tahun 2015 dan penutup sebagai akhir.

Isu-isu yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bina Penta adalah masih tetap dengan isu strategis dalam Bina Penta Naker pembinaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja berkaitan dengan isu kerangka besar dari kondisi dan permasalahan angkatan kerja, bahwa jumlah angkatan kerja yang begitu besar masih terdapat *gap* antara *demand and supply* sehingga ini disebabkan oleh pasar kerja kita yang belum optimal dan masih menyisakan permasalahan dari pengangguran. Diantaranya *gap* tersebut adalah ketidaksesuaian kualifikasi kemudian keterbatasan akses informasi dan juga kondisi dan karakteristik dari jumlah angkatan kerja kita yang bisa diupayakan untuk solusi dan penyelesaian masalahnya dari tahun ke tahun, mudah-mudahan Tahun 2015 ini akan menjadi lebih baik dengan mengkomposisikan untuk kebutuhan dari *layer* utama atau pekerja formal di dalam melakukan fasilitasi pelayanan, penempatan tenaga kerja, untuk menjadikan tenaga-tenaga kerja ini menjadi pekerja yang layak.

Yang kedua, yang menjadi persoalan utama dalam angkatan kerja kita adalah tenaga kerja kita yang rentan, yang memiliki pendidikan dan bahkan tidak lulus SD, SMP memasuki *layer* yang kedua, untuk itu perlu fasilitasi perluasan kesempatan kerja sehingga mereka bisa bekerja. Untuk nomenklatur dari Bina Penta Naker dengan tugas dan fungsinya maka dalam program nawacita ada 4 koridor, nomer 1, nomer 2 dan nomer 6 yang terkait dengan tugas dari Bina Penta dan dalam rangka terakhir meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Selanjutnya, kami juga sebagai pendahuluan ingin menyampaikan sedikit lanjut permasalahan dari profil angkatan kerja saat ini, jumlah penganggur yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang rendah sebagai isu yang mendahului dan perlu penyiapan khusus untuk mereka siap dalam masuk ke pasar kerja melalui pelatihan kerja, ada pun jumlah angkatan kerja kita

pada saat ini adalah 121.087 orang atau sekitar 66,60% dari jumlah penduduk dan untuk yang masih menganggur atau penganggur terbuka masih menyisakan 7,24 juta orang atau 5,94% yang mayoritasnya adalah SD, SMP, SMA, SMK, D1, D2 dan D3 juga tidak terkecuali lulusan dari perguruan tinggi. Kemudian, angkatan kerja ini ada yang setengah penganggur berjumlah 9,068 juta orang yang harus didorong untuk menjadi pekerja dan ada yang bekerja paruh waktu 26,09 juta orang. Dengan demikian, maka ini menjadi tugas utama dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dan kondisi angkatan kerja ini juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan kita ada yang putus SD, tidak lanjut SMP, putus SMP tidak lanjut ke SMA, putus SMA tidak bisa lanjut ke Perguruan Tinggi ini berkisar angkatan jumlahnya adalah 4 juta lebih dan 1 juta lebih yang tidak bisa masuk ke SMA dan Perguruan Tinggi, nah oleh karena itu mereka masuk ke pasar kerja dengan demikian menjadi persoalan bagi pasar kerja untuk menyerap tenaga kerja ini yang tidak terakses dengan baik, ada pun rancangan struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana sebelumnya maka ada perubahan tugas dan fungsi untuk Dirjen Penta Naker ini dilengkapi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Eselon II kemudian Eselon II lainnya adalah Direktorat Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan, Direktorat Bina Pengantar Kerja dan Bursa Kerja, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan hadir disini semua Pak, Bapak dan Ibu Pimpinan juga Anggota Dewan yang kami hormati dan tentunya kami juga dilengkapi dengan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan dan perluasan kerja satu-satunya yang ada di Lembang dan juga kelompok jabatan fungsional.

Ada pun tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Penta Naker adalah menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja, di bidang bimbingan jabatan, dibidang pengantar kerja dan bursa kerja, di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri dan pengembangan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan juga pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri. Ada pun nomenklatur kegiatan untuk unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Penta Naker adalah sebagai berikut;

Nama kegiatan antara lain, kegiatan penempatan tenaga kerja yang ditangani oleh unit eselon II Direktorat Bina Pengantar Kerja dan Bursa Kerja. Kegiatan peningkatan pengembangan pasar kerja oleh Direktorat Informasi Pasar Kerja dan bimbingan jabatan, kegiatan pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri yang ditangani oleh Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja oleh Direktorat Bina Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, kegiatan peningkatan pengendalian tenaga kerja asing oleh Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kegiatan pengembangan

model inkubasi bisnis dan perluasan kesempatan kerja oleh Balai Besar Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja di Lembang dan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, jadi ada 7 Satker di pusat.

**Bapak dan Ibu Pimpinan serta Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati.**

Untuk realisasi Tahun 2014 terealisasi anggaran yang diberikan ke Direktorat Jenderal Bina Penta dengan jumlah total Rp.589.884.351.000,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terealisasi adalah Rp.517.893.962.000,- (*Lima Ratus Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau sekitar 87% yang ditebarkan di pusat di 7 satker dan tetapi masih memiliki satuan kerja di daerah untuk dana dekonsentrasi di 33 Provinsi dan tugas pembantuan di 385 kabupaten kota dan 2 provinsi ini di Dinas-dinas tenaga kerja dan realisasi untuk di daerah baik dekon maupun tugas pembantuan terealisasi 94,81% atau Rp.263.050.572.000,- adapun kendala dan permasalahan dari penyerapan anggaran Tahun 2014 yang tidak optimal dikarenakan duta pusat persetujuannya di Tahun 2014 dilaksanakan pada 24 Maret 2014, yang kedua, POK Dekon dan PP baru diserahkan ke daerah pada 17 April 2014 dan yang ketiga, faktor penghematan pemotongan anggaran sesuai Inpres 4 Tahun 2014 pada bulan Juni 2014 dan masih terdapat pemblokiran anggaran dana PTKRN sebesar Rp.6,5 miliar terdapat pembatasan *fullboat meeting* dan perjalanan dinas sehingga ini tidak bisa mencapai secara optimal Tahun 2014. Namun demikian, untuk postur anggaran Direktorat Jenderal Bina Penta Naker dan rencana capaian program 2015 kami berterima kasih telah mendapatkan anggaran dengan bantuan dari Komisi IX DPR RI APBN awal mencapai Rp.853.208.000,- dan dari APBN awal ada tambahan APBNP Rp.220 miliar sehingga total menjadi Rp.1.073.208.000,- (*Satu Triliun Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Juta Rupiah*). Untuk penganggaran pada Tahun 2015 untuk pusat dan masih tetap memberikan proporsi untuk membantu dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 34 Provinsi dan tugas pembantuan di 34 Provinsi tersebut.

Ada pun komposisinya adalah 60,9% di pusat dan 39,1% di daerah. Untuk perubahan alokasi anggaran program Tahun 2015 untuk di pusat dari APBN awal Rp.519 miliar ditambah dengan 220 APBNP total menjadi Rp.739.277.741,- dan untuk daerah khususnya dekonsentrasi dan tugas pembantuan Rp.333.930.000,- untuk anggaran Tahun 2015 diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan program dan indikator dengan target, untuk pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja yang antara lain jumlah pengembangan tenan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja untuk 5330 orang, jumlah uji coba model perluasan kesempatan kerja, jumlah dokumen perencanaan laporan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan jumlah pengembangan kapasitas SDM serta layanan perkantoran dan sarana informasi dan promosi yang ditempatkan di Lembang atau di balai besar perluasan kesempatan kerja. Untuk

penempatan tenaga kerja dalam negeri dengan program kegiatan dan indikator antara lain memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja, antar daerah dan antar kerja luar negeri serta kelembagaan dan penempatan tenaga kerja di 650 lokasi, jumlah peningkatan, pemberdayaan tenaga kerja 546 orang petugas antar kerja.

**Bapak dan Ibu Pimpinan serta Bapak dan Ibu Anggota Dewan Komisi IX DPR RI yang kami hormati.**

Direktorat Jenderal Bina Penta saat ini memiliki kekurangan terhadap jumlah angkatan kerja dan seyogyanya satu dinas tenaga kerja karena pengantar kerja ini sangat penting, ini minimal memiliki 6 orang petugas, namun saat ini untuk seluruh Indonesia dengan 514 dinas tenaga kerja tinggal memiliki 340 orang, jadi mengapa juga banyak pengangguran yang tidak mendapatkan akses informasi untuk lowongan karena disebabkan oleh petugasnya yang kurang. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa jumlah fasilitasi penyuluhan dan bimbingan jabatan, untuk itu kami akan mengarahkan khusus untuk kebutuhan fasilitas dan bimbingan jabatan yang dapat ditempatkan khususnya untuk 8 sektor di MEA nanti. Kemudian, jumlah fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja muda wanita, penyandang cacat dan lanjut usia dan jumlah fasilitasi peningkatan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja. Selanjutnya, pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kami ditugaskan untuk membuat satu *grand design* untuk perlindungan pekerja migran ini 13 atase, kemudian memberikan fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri berdasarkan jabatan di 275 lokasi, jumlah fasilitasi perlindungan tenaga kerja luar negeri kemudian layanan perijinan dan pembinaan kelembagaan kemudian fasilitasi kerja sama internasional dalam rangka penguatan, penempatan dan perlindungan TKI yang saat ini masih berjumlah 12 dokumen nanti akan ditingkatkan menjadi 25 dokumen, tentunya ini perlu diadakan *join working group* antara Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja penempatan. Layanan perkantoran juga harus diberikan pada atase tenaga kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha baru, pemberdayaan masyarakat padat karya, pemberdayaan dan pelatihan tenaga kerja sukarela melalui penugasan pendampingan masyarakat, kemudian kegiatan pembinaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna dan penyusunan database wirausaha, kegiatan atau program dan indikator lainnya adalah peningkatan pasar kerja antara lain jumlah peningkatan layanan informasi pasar kerja agar memenuhi standar ISO 90001 2008 untuk 15 lokasi. Saat ini layanan dinas tenaga kerja yang telah memiliki ISO sudah berjumlah 22 kantor, seyogyanya 514 dinas ini harus sudah ISO semua, namun tahun ini kami hanya bisa memfasilitasi untuk 15 lokasi. Jumlah sistem informasi serta pembinaan dan pembangunan pusat layanan informasi tenaga kerja di kabupaten kota, jumlah peningkatan kualitas bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum, pengembangan bursa kerja serta kondisi pasar kerja yang dianalisis baik dalam negeri maupun luar negeri serta jabatan dan pengembangan pasar kerjanya dan laporan serta layanan



perkantoran. Untuk peningkatan pengendalian tenaga kerja asing untuk Tahun 2015 dialokasikan untuk program kegiatan dan indikator yang terdiri dari jumlah kegiatan perijinan penggunaan tenaga kerja asing melalui Peraturan-peraturan dan tahun ini kami menargetkan untuk 7 peraturan dalam rangka pengendalian tenaga kerja asing, jumlah penyerapan tenaga kerja pendamping di sektor jasa, penyerapan tenaga kerja pendamping di sektor industri kemudian tenaga pelayanan perijinan pemenang tenaga kerja asing yang efektif dan efisien dengan fasilitas online system saat ini Bapak dan Ibu Pimpinan serta Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat kami telah melakukan pelayanan online sistem dan *paper less*, jadi untuk pengendalian tenaga kerja asing dan juga layanan perkantoran. Untuk program kegiatan yang lainnya adalah dukungan manajemen antara lain dokumen peraturan dan kerja sama luar negeri kemudian perencanaan program anggaran data informasi bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja...(rekaman terputus)...bidang penempatan serta laporan evaluasi dan kegiatan pembinaan serta koordinasi eksternal dan internal sosialisasi program penempatan perluasan kesempatan kerja juga jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan dan dokumen kepegawaian organisasi rumah tangga serta layanan perkantoran.

Demikian Bapak dan Ibu Pimpinan, kami lanjutkan untuk APBNP Tahun 2015, kami diberikan anggaran Rp.220 miliar melalui Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi dari program nasional pengembangan penghidupan berkelanjutan atau P2B yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan Kementerian lainnya dimana Kementerian Ketenagakerjaan mendapat jenis kegiatan nomer 3 pengembangan tenaga kerja rentan untuk target 15.000 tenaga kerja muda dengan total anggaran Rp.220 miliar. Ada pun program pengembangan penghidupan berkelanjutan ini diperuntukkan untuk memberikan upaya lompatan pengembangan aktivitas ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan pemberdayaan dan keterampilan kerja untuk usaha mandiri. Kemudian, memberikan sarana dalam rangka mengembangkan aset masyarakat melalui kedisiplinan dan pengelolaan keuangan, kemudian untuk memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terpenuhi terlebih dahulu dan dengan target kejelasan pada masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, maka kami telah merumuskan untuk data dan informasi lokasi pelaksanaan kegiatan, ini adalah wilayah dengan kondisi yang kemiskinannya tinggi, kemudian wilayah dengan kondisi dukungan sarana prasarana yang sangat rendah, dengan fokus individu atau rumah tangga yang kurang mampu, yang berpendapatan 40% terbawah. Ada pun jenis lokus dan jumlah dari wilayah yang akan diberikan kegiatan adalah 26 kecamatan sebagai *pilot project* di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Bengkulu dan Jambi, disamping itu 157 kecamatan penyiapan infrastruktur ekonomi yang tersebar di seluruh provinsi dengan wilayah yang kurang berkembang di 250 kecamatan dengan tersebar di 18 provinsi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Untuk wilayah yang tingkat pengangguran terbuka tinggi atau ITK di 100 kecamatan antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Kepri, NTB, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu,

Sumatera Selatan, Jambi dan Kalbar. Untuk rencana penggunaan RAPBNP Tahun 2015 dilaksanakan untuk pengembangan tenaga kerja yang rentan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya untuk pengembangan keterampilan wira usaha tenaga kerja muda 24.000 yang terdiri dari dan juga pendampingan pemberdayaan untuk 1000 orang dan pemberdayaan dengan aset produktif untuk 5000 orang dengan fasilitasi setiap orang mendapatkan Rp.5.000.000,- dengan untuk kegiatan yang pertama, pengembangan keterampilan dan wirausaha dengan anggaran 150 miliar, 45 miliar untuk pendamping 1000 orang dan 25 miliar untuk aset produktif. Total adalah 220 miliar. Ada pun rincian dari kegiatan penggunaannya untuk kegiatan nomer 1 adalah untuk korban PHK 3000 orang, untuk setengah penganggur atau yang dibawah sejahtera ini 18.000 orang, untuk tenaga kerja khusus wanita dan tenaga kerja muda 9000 orang, padat karya produktif untuk nelayan dan petani 9000 orang dan tenaga kerja TKI Purna 3000 orang sehingga jumlahnya 24.000 orang dengan jumlah paket 480 paket.

Untuk kegiatan pendampingan pemberdayaan akan dilakukan untuk 1000 orang yang mendampingi 24000 orang sebagaimana yang sebelumnya dan dilakukan rekrutmen dan pembekalan pendamping kemudian ada biaya hidup selama 10 bulan, kemudian ada rekrutmen dan pembekalan motivator, ada honor motivator selama 3 bulan dan transport dan akomodasi yang seluruhnya berjumlah 45 miliar. Yang ketiga, adalah pemberdayaan dengan aset produktif untuk 5000 orang kali 5 juta dan dengan total anggaran 25 miliar.

Demikian Bapak dan Ibu Pimpinan serta Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati. Direktorat Jenderal Bina Penta Naker memiliki peran strategis dalam pengentasan pengangguran terutama pada sektor penempatan tenaga kerja dan pemberdayaan tenaga kerja sektor informal. Alokasi APBNP Direktorat Jenderal Bina Penta Naker sebesar Rp.220 miliar dialokasikan sebagai bagian dari program pengembangan penghidupan berkelanjutan, mudah-mudahan tahun depan masih berlanjut Pak, Bu dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dan yang terakhir, mohon persetujuan dari Pimpinan dan Komisi IX DPR RI yang terhormat terhadap APBNP Tahun 2015 untuk Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih Dirjen Bina Penta.  
Selanjutnya, kami persilakan Dirjen Bina Lattas.

**DIRJEN BINA LATTAS :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI serta Ibu  
Dirjen Bina Penta dan Teman-teman kami dari Direktorat Jenderal  
Bina Penta dan Bina Lattas.**

**Bapak Ketua dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

Saya ingin menginformasikan sedikit sebelum menyentuh kepada masalah APBNP terkait dengan kondisi-kondisi kebinalattasan, yang pertama adalah kami menginformasikan kondisi aktual balai latihan kerja yang saat ini berjumlah sebanyak 276 untuk balai latihan kerja dan 24 balai latihan produktivitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang berikutnya, juga kami informasikan ada sebanyak 8066 lembaga pelatihan kerja swasta itu milik masyarakat dan juga ada balai latihan kerja luar negeri itu menangani pelatihan domestik wartel sebanyak 456. Distribusi yang terbanyak lembaga-lembaga milik pemerintah utamanya ini terletak ada di daerah sekitar pulau Jawa, Jawa Tengah tertinggi, Jawa Timur serta di Jawa Barat dan di Sumatera, di Aceh serta di Sumatera Utara. Sedangkan di daerah lain hanya sekitar kisaran antara 3 sampai dengan 8 per provinsinya lembaga pelatihan kita. Bila dilihat dari jumlah kapasitas yang dimiliki oleh BLK-BLK Pemerintah tersebut kita mengestimasi dan berhitung bersama-sama dengan BLK masing-masing sejumlah 276.598 orang per tahun kalau memang ini kapasitasnya mau dioptimalkan.

Beberapa tahun terakhir ini supaya ada keterkaitan antara supply dan demand ketenagakerjaan dengan penempatan, kita berupaya beberapa tahun terakhir ini Balai-balai latihan kerja di dorong untuk melakukan kerja sama dengan industri atau Perusahaan-perusahaan agar supaya out put dari Lembaga-lembaga pelatihan pemerintahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan atau bisa langsung disalurkan sebagai tenaga kerja kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dari BLK-BLK yang sudah melakukan kerja sama tercatat ada sekitar 4719 perusahaan atau industri yang sudah menjalin kerja sama di berbagai balai-balai latihan kerja. Jumlah lembaga balai latihan kerja swasta yang tadi sejumlah 8066 LPK tersebut, distribusinya juga terbanyak ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Ada pun kapasitas pelatihan kalau di LPK swasta dengan yang jumlah 8000 sekian itu kita menghitung estimasi sekitar 483.960 orang yang bisa di latih setiap tahun di LPK-LPK swasta. Setelah kita melakukan evaluasi, melakukan audit terhadap BLK-BLK pemerintah khususnya yang sejumlah 276 tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa kondisi BLK yang baik sekitar 39 atau sebesar lebih kurang 13% dari seluruh jumlah yang lebih banyak untuk ada di daerah Jawa yang terbaik. Selanjutnya, di Sumatera dan di Kalimantan. Sedangkan kondisi sedang ada 63 BLK dan selebihnya adalah dilakukan misi buruh.

Dilihat dari kesiapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang perlu kita susun sebagai dasar dalam pelaksanaan pelatihan untuk mencapai SDM yang kompeten saat ini SKKN yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker sebanyak 406 dengan distribusi di 9 sektor dan yang tertinggi

ada di sektor konstruksi, nomer 2 mungkin di sektor kebudayaan, pariwisata dan seni dan yang ketiga ada di pertanian, perkebunan, perikanan dan di kehutanan.

Strategi pengembangan balai latihan kerja yang kita lakukan ke depan adalah yang pertama kalau kita lihat dari bisnis proses Dirjen Bina Lattas memang dalam konteks bagaimana mengembangkan atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa sektor atau instansi yang harus kita koordinasikan yaitu sebanyak ada 5 instansi diluar Kemenaker, yang pertama ada lembaga akreditasi, ada BNSB, ada kementerian lain atau sektor lain terus ada pemerintah daerah dan LPK atau perusahaan, dilihat dari bisnis proses tersebut ada 3 pilar yang menjadi peran utama di dalam pengembangan kualitas SDM kita, yang pertama adalah terkait dengan program, program yang kita lakukan melalui penetapan SKKN ini yang harus menyusun adalah Kementerian atau Lembaga teknis dengan asosiasi dibawahnya dan yang menetapkan adalah Kementerian. Itulah yang akhir-akhir ini Bapak Menteri kami sudah bersurat kepada beberapa Kementerian prioritas khususnya agar mempercepat penyelesaian standar-standar kompetensi kerja nasional.

Yang berikutnya adalah yang terkait dengan pembinaan kelembagaan atau lembaga pelatihan itu yang menjadi tugasnya Bina Lattas, kita mengawalinya melalui satu kegiatan yang kita sebut akreditasi lembaga pelatihan dan ini pun dilakukan oleh lembaga akreditasi, lembaga tersebut independen dan berada dibawah koordinasi Dirjen Bina Lattas. Yang berikutnya lagi adalah masalah sertifikasi, sertifikasi ini yang menjadi tugas dan fungsinya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang akhir-akhir ini sesuai dengan arahan Pimpinan dan juga sesuai dengan kebutuhan menjelang sertifikasi ini betul-betul menjadi perhatian sehingga ke depan bagaimana peningkatan percepatan sertifikasi tenaga-tenaga kerja betul-betul menjadi perhatian ke depan. Di lain pihak selain pelatihan juga Bina Lattas juga melakukan upaya peningkatan produktivitas nasional dimana di dalam kelembagaannya ada Lembaga Produksi Nasional dan ada beberapa unsur lain yang terkait, dari mulai Kementerian atau lembaga teknis atau Pemda, LPP dan perusahaan atau organisasi, inilah bisnis proses yang harus dilakukan oleh Dirjen Bina Lattas khususnya dalam konteks bagaimana pengembangan SDM atau peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja kita. Rencana yang kita ingin lakukan ke depan adalah bahwa rancang bangun pengembangan BLK kita akan melakukan satu klasifikasi dari BLK-BLK Pemerintah dimana kita membagi tugas dan fungsi dari BLK-BLK yang ada supaya efektivitas atau penggerakan pelatihan di seluruh lembaga yang ada, baik lembaga pemerintah punya maupun lembaga pelatihan milik masyarakat kita kelompokkan menjadi tiga, yang pertama adalah lembaga pelatihan, balai latihan kerja yang kita klasifikasi menjadi BLK pengembangan, disini ada 5 (lima) UPTP yang kita masukkan karena 5 UPTP tersebut setingkat eselon 2, diperkuat perannya sebagai pusat pengembangan, pusat pemberdayaan dan pusat percontohan, target yang di LK Pengembangan ini adalah menjadi pusat pengembangan dan uji coba serta menjadi pusat percontohan untuk 34 balai latihan kerja baik unit pemerintah pusat 9 UPTP dan 23 UPTP yang posisinya berada di Ibukota provinsi, nah dari itulah nanti BLK 32 tersebut akan dijadikan BLK percontohan bagi BLK-BLK yang berada di kabupaten kota wilayah

masing-masing. BLK-BLK yang berada di kabupaten kota akan kita jadikan BLK pemberdayaan yang tugasnya salah satunya adalah melakukan pemberdayaan terhadap Lembaga-lembaga pelatihan kerja milik masyarakat yang berada di wilayah masing-masing, dengan struktur piranti ini mudah-mudahan upaya-upaya pemberdayaan dan kapasitas lembaga pelatihan akan bisa berjalan dengan baik.

Melihat dari tugas dan fungsi BLK sesuai dengan tupologi nanti bisa dilihat di dalam matriks tersebut, intinya adalah kita mencoba memetakan dan membagi tugas masing-masing kelompok dari BLK pengembangan, percontohan dan pemberdayaan, mudah-mudahan dengan tugas dan fungsi yang kita kelompokkan ini BLK-BLK tersebut sesuai dengan tugasnya akan lebih kepada arah-arah yang kita kehendaki. Ada pun strategi pengembangan Balai Latihan Kerja ada 5 hal yang menjadi *concern* kami, yang pertama adalah percepatan pengembangan standar kompetensi. Yang kedua, percepatan penerapan pelatihan berbasis kompeten sehingga mengacu kepada KKNi. Yang ketiga, adalah penguatan kelembagaan BLK, Yang ke empat, peningkatan kompetensi SDM dan terakhir, sertifikasi lulusan BLK, dari kondisi BLK-BLK yang tadi kita sudah lakukan evaluasinya ke depan kita ingin menyumbangkan BLK melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, kita ingin menguatkan BLK dari sisi sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kompetensi SDM yang ada di dalam BLK-BLK tersebut.
3. Pengembangan program dan uji coba pelatihan berbasis kompetensi.

Jadi, BLK-BLK yang kita kelompokkan masuk dalam tahap pertama, *concernnya* adalah perlakuan seperti tadi. Yang kedua, setelah mereka kita berikan *treatment* tahun-tahun berikutnya mereka masuk ke dalam tahap berikutnya, yang kita lakukan adalah penguatan kelembagaan standar atau penguatan kelembagaan dari aspek penerapan standar mutu. Yang berikutnya adalah penerapan pelatihan berbasis kompetensi, maksudnya adalah diseminasi dan pelaksanaan BLK, jadi harapannya adalah kita ingin menyakinkan di tahap kedua ini bahwa Balai-balai latihan kerja itu betul-betul menerapkan pelatihan berbasis kompetensi yang acuannya adalah terakhir kita lakukan uji kompetensi terhadap alumni-alumni pelatihan.

Realisasi anggaran Tahun 2014 dari pagu Rp.782 miliar yang terealisasi sebanyak 684 yaitu kurang lebih 87,56% distribusi realisasinya di tingkat pusat dari Rp.283.416.566,- yang terealisasi 231 miliar sekian atau 81,64% hal ini agak rendah dibanding rata-rata secara keseluruhan di tingkat pusat mengingat ada bantuan luar negeri yang memang tidak bisa direalisasikan pada Tahun 2014 dikarenakan memang regulasi dari Negara donor tersebut menghendaki kita prosesnya agar lebih panjang. Yang berikutnya adalah yang didistribusikan anggaran melalui IPTP ada sebanyak 466, yang terealisasi sebanyak 90% atau Rp.422 miliar, sedangkan dana yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dari Rp.32 miliar sekian, yang teralisasi adalah 31 miliar atau 96%, jadi secara keseluruhan rata-rata realisasi berkisar 87,56%. Ada pun capaian kinerja Dirjen Bina Lattas Tahun 2014 antara lain adalah penetapan SKKNI dari target 64 terealisasi sebanyak 64, dari target 60 SKKNI terealisasi

sebanyak 64 sedangkan dari jumlah penyesuaian program dan modul sesuai dengan target yaitu 75 program yang telah ditetapkan, sedangkan untuk realisasi berdasarkan kompetensi dari 64.535 orang targetnya, yang terealisasi 62.073 atau 96% sedangkan dari jumlah lembaga pelatihan dan meningkatkan kapasitasnya dari 440 lembaga terealisasi 432 lembaga dan peningkatan instruktur dan tenaga pengelola pelatihan dari 1463 orang yang terealisasi adalah 1405 orang atau 96,04%.

Jumlah peserta pemagangan dalam negeri yang targetnya 7440 terealisasi 6780 atau 91% jumlah calon wirausaha baru yang dilatih targetnya sebanyak 6550, terealisasi 6475 atau 98,8% jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya dari target 1915 orang terealisasi 1775 orang untuk 92,69% ada pun dari aspek sertifikasi dengan target 10.000 terealisasi 1012 orang, sedangkan pembentukan LSB dari 100 LSB yang terealisasi 31 LSB, 120 orang terealisasi secara keseluruhan. Permasalahan yang ada kenapa realisasi kami tidak mencapai hasil yang maksimal dikarenakan pertama, memang realisasi anggaran pada Tahun 2014 baru bisa berjalan 9 April 2014. Yang kedua, adalah terjadinya efisiensi untuk peningkatan yang bersumber dari belanja perjalanan dan belanja barang dan operasional lainnya serta dari efisiensi hasil pelelangan pekerjaan yang bersifat kontraktual. Program dan anggaran Tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi Bina Lattas menurut Perpres No.18 Tahun 2015 tugas Dirjen Bina Lattas adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas dengan fungsi-fungsi antara lain adalah rumusan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas.

Nomer dua adalah pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan. Rancangan struktur organisasi Dirjen Bina Lattas sebenarnya tidak banyak perubahan, yang berubah hanya di Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan pelatihan kerja yang semula namanya Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan berubah menjadi Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, yang kedua adalah di Direktorat Bina Lembaga dan Sarana berubah menjadi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan, dari struktur organisasi ini Dirjen Lattas ini ada sebanyak 7 Satker pusat dan 16 Satker daerah. Nawa kerja ketenagakerjaan yang terkait dengan Dirjen Bina Lattas ada dua, yang pertama adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan yang kedua adalah percepatan sertifikasi kompetensi.

Nomenklatur program dan nama kegiatan untuk unit eselon 2 dari Dirjen Bina Lattas programnya adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, ada pun nama-nama kegiatan untuk setiap eselon 2 bisa terlihat di dalam tabel, yang pertama adalah pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, yang kedua, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan. Tiga, peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas, yang ke empat, pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri. Yang kelima, pengembangan dan peningkatan produktivitas, yang ke enam, dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya Dirjen Bina Lattas dan terakhir adalah pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.

Berbicara capaian program dan kegiatan Tahun 2012, yang pertama adalah pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja dengan target 72 SKKN ini yang akan ditetapkan dan pelatihan sebanyak 84.400 orang, alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Dirjen Bina Lattas setelah mendapatkan APBNP adalah sebanyak Rp.1.632.812.802.000,- alokasi tersebut digunakan yang pertama tadi untuk SKKN sebanyak 72, untuk pelatihan tenaga kerja sebanyak 84.400 yang kedua adalah peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan dengan target 2098 orang, yang ketiga adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan kompilasi dengan target 300 lembaga yang terakreditasi dan 590 lembaga yang tingkatkan sarananya. Yang ke empat, pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri dengan target 8310 orang pemagangan dalam negeri dan 2000 orang pemagangan luar negeri. Yang ke enam, pengembangan dan peningkatan produktivitas dengan target 2180 tenaga kerja dan 254 lembaga yang meningkat produktivitasnya. Yang ke enam, dukungan manajemen dan dukungan teknis untuk sebanyak 23 satker UPT Pusat dan yang ke tujuh adalah pengembangan sistem dan pelatihan sertifikasi kompetensi profesi dengan target 325 LA spiker lisensi dan 161.500 tenaga kerja yang di sertifikasi, 3696 asesor dan 14400 calon tenaga kerja Indonesia yang disertifikasi.

Alokasi anggaran Tahun 2015 kalau kita lihat dari fungsinya ada dua fungsi, yang pertama, bersumber dari fungsi ekonomi sebanyak semula 968 miliar setelah ada pengesahan Kementerian menjadi 910 miliar dan setelah mendapatkan tambahan menjadi Rp.1.195.000.000,- yang bersumber dari alokasi pendidikan sebanyak semula 452 miliar sekian, setelah ada pengesahan Kementerian menjadi 437 miliar dan setelah mendapat penambahan menjadi tetap, jadi total alokasi anggaran untuk Dirjen Bina Lattas yang semula Rp.1.420.000.000,- menjadi Rp.1.632.000.000,- bila melihat dari sumber dana alokasi anggaran Dirjen Bina Lattas bersumber dari rupiah murni PNBPN dan PHLN yang distribusinya bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama adalah Direktorat Dirjen Bina Lattas yang semula Rp.672 miliar berubah menjadi Rp.712 miliar, BNSP yang semula 41 miliar menjadi 206 miliar, UPTP yang didistribusikan melalui 16 UPTP dari semula Rp.577 miliar menjadi Rp.530 miliar ini ada perubahan satkernya semula 22 menjadi 16 karena yang 6 merupakan satker ketransmigrasian, yang ketiga adalah dana melalui dekonsentrasi yang semula Rp.129 miliar menjadi Rp.182 miliar. Bila melihat dari jenis belanja alokasi anggaran Dirjen Bina Lattas kelihatan bahwa alokasi tambahan PNBPN tersebut di dalam kegiatan belanja barang dan non operasional.

Bila kita lihat dari grafik tersebut, terlihat bahwa presentase alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang pertama, belanja pegawai sebanyak 95,5% ini 154 miliar ini agak besar memang, jumlah pegawai Dirjen Bina Lattas ada kurang lebih 1600 pegawai terus belanja operasional 5%, belanja barang 51% dan belanja modal sebanyak 33,7%. APBNP Tahun 2015 kita alokasikan ada yang mendapat bantuan dari APBNP untuk Bina Lattas sebanyak 285 miliar teralokasi untuk kegiatan,

yang pertama adalah pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja sebanyak 5 miliar, yang kedua, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan sebanyak 25 miliar dan yang ketiga adalah pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi sebanyak Rp.165 miliar.

Ada pun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui alokasi APBNP adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja teralokasi untuk kegiatan-kegiatan prioritas antara lain penyusunan standar kompetensi kerja untuk sebanyak 22 SKKNI dan penyusunan peta kompetensi sebanyak 3 peta kompetensi, teralokasi dengan nilai Rp.15 miliar.
2. Pelatihan berbasis kompetensi ini sebanyak 24.528 orang dengan nilai alokasi anggaran Rp.80 miliar.
3. Peningkatan kompetensi instruktur dan lembaga pelatihan teralokasi sebanyak Rp.25 miliar untuk kegiatan-kegiatan prioritas, yang pertama, untuk pelatihan metodologi instruktur pelatihan swasta, karena lembaga pelatihan kerja swasta yang sebanyak 8666 orang kurang lebih tadi itu kita akan melakukan pelatihannya untuk instruktur sebanyak 544 orang. Yang berikutnya adalah diklat dasar instruktur sebanyak 32 orang, diklat tenaga pelatihan sebanyak 224 orang dan kredit instruktur sebanyak 336 orang, jumlah alokasi anggarannya sebanyak Rp.25 miliar.

Untuk pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, yang pertama adalah untuk pelatihan asesor dengan nilai 35 miliar dengan target sebanyak 3000 orang untuk pelatihan asesornya terus latihan untuk kulit asesornya sebanyak 440 orang, terus untuk pelatihan masar asesornya sebanyak 400 orangserta kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung dalam rangka pemberian lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi. Yang kedua, adalah pembentukan lembaga sertifikasi profesi dengan alokasi sebanyak 10 miliar dengan kegiatan Antara lain Intek pengembangan sistem dan penerapan manajemen mutu sebanyak 264 orang intek pengembangan skema sertifikasi sebanyak 528 orang, verifikasi skema sertifikasi sebanyak 30 skema, harmonisasi sertifikasi sebanyak 24 lembaga dan koordinasi dengan Pokja atau sektor prioritas sebanyak 12 sektor serta assessment LSP 200 Lembaga atau 200 LSP. Itulah pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi target secara total keseluruhannya yang akan di sertifikasi adalah sebanyak 264 ribu orang itu untuk pemberian sertifikasi kompetensi kerja di sektor prioritas sebanyak 120 ribu orang dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk calon tenaga kerja Indonesia, untuk domestik ..(tidak jelas)..sebanyak 144 ribu orang. Sedangkan untuk percepatan sertifikasi kompetensi ada 1 juta lembar pencetakan sertifikasi dan pembentukan panitia teknis uji kompetensi sebanyak 12 sektor.

### **Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,**

Itulah yang dapat kami sampaikan, kami laporkan terkait dengan penggunaan alokasi anggaran dan rencana kegiatan Tahun 2015 dimana alokasi Dirjen Bina Lattas sebanyak Rp.1.632.000.000,- untuk membiayai



aktivitas sebanyak 23 satker yang terdiri dari 7 unit eselon 2 dan 16 unit UPT pusat. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas penyampaian kami yang mungkin belum begitu lancar, pengalaman pertama Bapak dan Ibu sekalian buat saya, jadi mohon yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami mohon persetujuan Bapak dan Ibu atas rencana-rencana yang telah kami paparkan tersebut.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Dirjen.

**Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.**

Kami informasikan bahwa sekarang telah dihadiri 26 Anggota dari 9 Fraksi, dengan demikian Rapat ini sudah sah, kuorum untuk mengambil keputusan. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adalah pendalaman, pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi IX DPR RI, sudah terdaftar beberapa orang. Yang pertama, yang terhormat Ibu Siti Masrifah kami persilakan.

**F-PKB (Dra. Hj.SITI MASRIFAH, MA) :**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Sahabat-sahabat Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

**Yang kami hormati hadir Dirjen Bina Penta Naker ya sekarang, Bina Lattas dan seluruh jajaran Bina Pentad an Bina Lattas Naker.**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Perkenalkan nama saya Siti Masrifah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Dapil Banten III. Ada beberapa hal yang ingin kami perjelas dari beberapa uraian yang sudah disampaikan kedua Dirjen. Yang pertama, kami sudah melihat atau mendengarkan paparan dari kedua Dirjen ini, ada beberapa catatan mungkin buat kedua Dirjen yang hadir. Yang pertama, kalau kita melihat dari seluruh paparan kemarin kita sudah mendengarkan juga paparan ini sebenarnya sudah agak lengkap tetapi belum lengkap betul, karena sekali lagi ada beberapa kegiatan yang memang disini disebutkan secara garis besar, kita tidak tahu rincian sehingga kalau di penghujung paparan disampaikan bahwa kami ingin mendapatkan masukkan bahkan dukungan dari Komisi IX DPR RI terus terang kami belum bisa menyampaikan itu sebelum jelas betul program yang sudah disebutkan disini rinciannya seperti apa. Jadi, yang pertama tentu kami masih membutuhkan beberapa rincian dari program yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam forum yang mulia ini. Yang kedua, dalam APBN postur anggaran belum mencerminkan, saya tidak tahu ya

karena memang baru global adil gender anggaran itu yang menggambarkan keterwakilan dari misalnya pekerja perempuan dan lain-lainnya. Saya kira nanti ketika membreak down program itu, saya ingin dari kedua Dirjen ada unsur itu ya mempertimbangkan keadilan gender itu.

Kemudian, yang ketiga, ada beberapa program yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Erlena lokus kegiatan, saya melihat hanya beberapa dan kebetulan Dapil saya sama Mbak Okky tidak dapat ya, saya Banten III, Mbak Okky Jakarta. Ada beberapa program tetapi saya kira nanti ada beberapa program ini yang kami ingin mengetahui betul apa yang menjadi output dari setiap kegiatan yang tadi disampaikan oleh dua Dirjen ini. Kemudian, yang ketiga tadi disampaikan bahwa kalau di Bina Penta sekitar 60,9% itu dana akan dipakai untuk di pusat dan 31,1% itu akan dititipkan ke daerah atau dana tekon. Kami ingin meminta penjelasan kepada Ibu Rena apa yang menjadi pertimbangan saat menentukan sekian persen di pusat dan sekian persen di daerah dan peruntukannya mohon lebih diperjelas lagi di paparan tadi.

Kemudian, untuk Bina Penta ini ya, waktu kita Raker dengan Bapak Menteri kami pernah mengusulkan bahwa harus ada revolusi kurikulum dari BLK, nah saya tidak melihat di beberapa mata anggaran yang telah disampaikan bahwa akan ada program yang menuju ke arah revolusi kurikulum di BLK ini ya, mungkin masih bisa dimasukkan beberapa kegiatan yang itu kira-kira bisa mendukung kesana begitu. Kemudian, sekailagi saya melihat di catatan paper alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja, saya melihat yang terbesar di belanja barang dan operasional yang sampai mencapai 836 miliar kalau tidak salah, mohon penjelasan ini penggunaannya untuk apa, karena itu secara global tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak.

Kemudian, satu lagi di APBNP itu yang sebesar 285 miliar tambahan itu ada satu *item* permintaan skema sertifikasi, Bapak sebutkan outputnya 125 saya mohon dijelaskan apa yang mau diskemakan dari sertifikasi ini begitu. Kemudian, satu lagi tambahan buat Ibu Rena beberapa program mata anggaran yang Ibu sampaikan, saya ingin tahu juga bagaimana rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan, tadi disebutkan ada sekitar diantaranya seperti ini pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja, kami tidak ingin bahwa satu *item* kegiatan itu nanti akan ada duplikasi di kegiatan yang selanjutnya. Nah, ini kami akan tahu itu ketika ada rincian program secara jelas dari beberapa *item* yang Ibu sebutkan tadi. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin nanti sahabat-sahabat yang lain bisa menambahkan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Irma Suryani.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih kepada Ketua Komisi IX DPR RI dan Kawan-kawan.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Kepada yang terhormat Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas beserta seluruh jajarannya.**

Saya tadi datang terlambat tetapi saya ingin minta penjelasan Ibu dari Bina Penta terkait masalah premi asuransi TKI yang kemarin waktu kita Raker dengan Pak Menteri juga pernah saya tanyakan, digunakan untuk apa dan dimana dana itu sampai sekarang, karena menurut BPK sampai hari ini dana tersebut tidak jelas keberadaannya karena moratorium itu. Kemudian, Pak Yunus dari BPK juga mengatakan agar Kepolisian segera menindaklanjuti temuan BPK terkait masalah penggelembungan proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data TKI di Bina Penta senilai 7,14 miliar sampai hari ini kasus itu juga belum jelas.

Ibu, saya ingin menegaskan kembali penggunaan dana asuransi yang Rp.400.000,- tersebut penggunaannya Rp.50.000,- untuk penampungan kemudian setelah kembali ada Rp.50.000,- juga untuk di luar negeri ada Rp.300.000,- namun menurut Teman-teman di AAI premi asuransi TKI bermasalah saja dalam 1 tahun itu sekitar 4.770 miliar, ...(*rekaman terputus*)...5.889 TKI bermasalah, namun pencairan asuransinya hanya sekitar 10% per tahun, nah kejadian ini bisa terjadi karena Disnaker trans Bina Penta tidak mengetahui, tidak mencatat kenapa TKI ini bermasalah, kenapa TKI ini pulang dan itu menjadi salah satu penyebab tidak bisa dibayarnya klaim asuransi, padahal kawan-kawan TKI yang kembali atau kabur itu mereka kabur bukan karena mereka tidak mau bekerja tetapi karena tidak dibayarkan gajinya oleh majikan. Nah, hal-hal seperti ini tidak menjadi perhatian dari Disnakertrans, BNP2TKI maupun dari Bina Penta, kondisi ini yang saya harus tegaskan kembali kepada Disnakertrans cq Bina Penta bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, cukup besar dana yang harus dibayarkan oleh Teman-teman TKI yang bermasalah ini, namun klaimnya tidak berbanding lurus, 10% yang bisa di klaim, kenapa? Karena SDM dari Teman-teman Disnakertrans yang tidak bekerja secara efektif sehingga alasan kenapa Kawan-kawan TKI ini pulang tidak dicatat dengan baik, nah klaim itu tidak bisa diuangkan karena prosedur dan datanya. Saya kira itu saja yang perlu saya tegaskan agar kawan-kawan yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah dalam melakukan klaim bisa betul-betul didampingi oleh Teman-teman BNP2TKI maupun Bina Penta dengan baik.

Saya kira itu.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Okky Asokawati.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Komisi IX DPR RI yang saya hormati.**

**Yang saya hormati Ibu Dirjen Bina Penta Naker beserta jajarannya,  
Bapak Dirjen Bina Lattas beserta jajarannya .**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama, terima kasih Ibu Dirjen, Pak Dirjen atas paparannya dan memang kedua Direktorat ini menurut hemat saya sangat berkaitan dengan kesempatan masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan, karenanya ada beberapa hal yang hendak saya soroti begitu. Untuk Ibu Dirjen, di slide nomer 15 di poin ke-5 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri itu Tahun 2014 realisasi anggaran atau pun penyerapan realisasinya 65,62% itu kenapa rendah, bagaimana sinerginya dengan BNP2TKI begitu ya, karena BNP2TKI itu juga kan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri dan itu kemudian saya coba sambung dengan slide nomer 23, di halaman 23 disitu dikatakan bahwa adanya jumlah fasilitasi perlindungan TKLN 159 kasus, nah apakah fasilitasi perlindungan TKLN ini sebanyak 159 kasus itu kaitannya juga masalah TKI yang di deportasi, kemudian mereka seperti rumah singgah seperti itu, apakah itu ada kaitannya dan bagaimana lalu hubungannya sekali lagi dengan BNP2TKI dan masih dengan penempatan dan perlindungan Tenaga-tenaga kerja di luar negeri jumlah atase tenaga kerja yang memberikan perlindungan pekerja migran karena menurut saya ini sangat penting itu 13 atase, apakah ini ada penambahan dalam jumlah atase di tahun-tahun sebelumnya dan untuk Tahun 2015 ini Ibu Dirjen, disini dikatakan bahwa untuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja itu anggarannya Rp,1.073 miliar tetapi untuk program dan kegiatan atau pun indikatornya itu tidak mencantumkan rupiahnya untuk setiap program sehingga saya tidak bisa melihat potret dari program kerja Ibu itu mana yang menjadi prioritas karena Ibu maunya gelondongan saja bahwa program dan penempatan perluasan kerja 1 miliar ini? 1 triliun oh seperti itu. Nah, kalau Ibu bisa memberikan gambaran mengenai anggaran setiap program dan indikatornya maka kami akan mudah begitu untuk mengawalnya dari setiap anggaran Ibu. Lalu, terkait dengan kode 2176 di halaman 25, nomer 25 adalah jumlah penggunaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu jumlah 430 itu dimana saja, tadi Ibu katakan juga Ibu mempunyai rencana atau untuk *paper less* begitu ya, nah dengan adanya jumlah penggunaan dan pembangunan pusat informasi pasar kerja ini 430 lokasi apakah itu akan mengikuti rencana Ibu untuk membuat yang *paper less* itu dan terkait dengan APBNP, disini dikatakan bahwa Ibu sudah jabarkan ya misalnya pengembangan terlampiran wirausaha tenaga kerja muda, korban PHK, setengah pengangguran dan sebagainya dengan segala anggaran, jumlah pakatnya, total anggaran. Pertanyaan saya, dari jumlah orang, jumlah

paket, jumlah anggaran per paket hingga total anggaran apakah outputnya itu nanti bisa menjamin bahwa setelah itu mereka bisa menghasilkan pekerjaan? Mereka bisa menghasilkan uang begitu? Karena kalau pun ada programnya, kemudian ada jumlahnya tetapi yang ditanyakan adalah outputnya bagaimana bisa menjamin bahwa mereka itu kemudian bisa sejahtera hidupnya dan tadi Ibu katakan perlu koordinasi dengan Kemenkumham PNK bagaimana koordinasi dengan Kementerian Koordinasi PNK ini.

Lalu yang terakhir, untuk Ibu Dirjen. Ini dikaitkan juga di halaman 36 transport dan akomodasi untuk 1000 orang, anggaran per orang Rp.10 juta, itu transport dan akomodasi untuk orang yang mana gitu, karena tadi Ibu sudah jabarkan untuk motivator ada, untuk pembekalan motivator ada, biaya hidup pendamping ada, nah ini transport dan akomodasi 1000 orang itu Rp.10 juta per orang artinya transportasinya dan akomodasinya itu siapa dan di provinsi mana, karena setiap provinsi tentu mempunyai *cost leaving* yang berbeda-beda, saya ingin tahu dan mengenai pemberdayaan dengan aset produktif untuk 5000 orang, setiap orangnya 5 juta, aset produktifnya itu siapa yang menyiapkan Bu dan apakah sudah ada aset produktif itu, kemudian dimana akan dilakukan pemberdayaan untuk 5000 orang yang menggunakan aset produktif ini dan untuk Bapak Dirjen Bina Lattas, sama seperti kepada Ibu Dirjen Bina Penta tahap pertama ada sarana dan prasarana BLK, tahap kedua kemudian penguatan kelembagaan, tahap ketiga, sertifikasi lulusan BLK, seberapa jauh mereka yang sudah mendapat sertifikasi itu kemudian bisa bekerja, itu yang menjadi pertanyaan buat saya.

Lalu saya tertarik dengan step nomer 22, poin ke-5 jumlah kejuruan yang diikuti dalam kompetensi ASCX di Vietnam 23 kejuruan, realisasinya 23, persentasinya 100%, saya ingin tahu apa itu kejuruan ASCX di Vietnam itu dan untuk RAPBNPnya di slide 34 di poin 1B DNSP semula Rp.41 miliar kemudian menjadi Rp.206.500 miliar ini menurut saya ini cukup besar sekali penambahannya, disitu Bapak katakan akan melesensi 325 LSP, TKI ter...(tidak jelas)...61.500 asesornya sekian, PTKInya sekian, pertanyaan saya Tahun 2014 itu berapa jumlahnya? Apakah dengan 206 miliar penambahan itu memang kemudian ditambah berapa orang begitu dikaitkan dengan *baseline* di Tahun 2014 karena ini banyak sekali dari 41 menjadi 206.

Yang terakhir, untuk PSKCTKI ya disitu dikatakan bahwa target TKI yang ditempatkan ini adalah 144.000 sementara seingat saya ketika Pak Menteri presentasi Tahun 2015 ini TKI akan ditempatkan itu sebanyak 300.000 orang, sementara disini Bapak 144.000 orang, apakah sisanya itu TKI non formal yang tidak dapat sertifikat begitu. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Dewi Asmara.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan serta Para Dirjen dari Tenaga Kerja.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terus terang saja setelah saya membaca laporan ini persis seperti yang dikatakan pembicara terdahulu agak lebih maju tetapi belum jelas bisa menggambarkan, jadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya dan ingin diketahui oleh Kawan-kawan kami di Komisi IX DPR RI dan khususnya juga yang ada di Badan Anggaran bahwa penambahan anggaran atau pun anggaran total APBN dengan APBNP ini sebetulnya penggunaannya jelas yaitu kenapa kami ingin rinci karena sebetulnya banyak yang kami harapkan untuk peningkatan produktivitas dan efektivitas dari Departemen ini, sebetulnya itu. Jadi, kalau apa yang digambarkan kepada kami ini terus terang mungkin kalau untuk Bina Penta sudah agak lebih detail tetapi di Bina Lattas ini sangat sulit bagi para Anggota mungkin Teman-teman untuk bisa bertanya secara langsung dan memahami anggarannya, mungkin selintas membaca belum tentu memahami kalau dengan penjelasan seperti ini, sementara persetujuannya itu justru diharapkan dari Kawan-kawan, karena bagaimana pun juga kebijakan dari anggaran itu ditetapkan di komisi dan ditetapkan oleh Teman-teman, nah untuk itulah kami meminta agar supaya ini bisa lebih baik dan bisa lebih detail, saya ambil contoh saja ada beberapa yang membuat kita juga menjadi saya sendiri menjadi berbeda antara paparan yang ketika itu kami terima dari Bina Penta mengenai jumlah target orang, contohnya saja ada kegiatan pengembangan keterampilan wirausaha tenaga kerja muda jumlah orangnya 3000 tetapi pada pembiayaan berikutnya itu kemudian menjadi berubah jumlah target orangnya, sehingga kami juga mengapa ada perbedaan-perbedaan angka-angka yang barangkali mungkin kami tidak perlu jabarkan tetapi target-target ini kemudian contohnya saja, ada dua bahan yang bisa berbeda dimana yang memakai kode 2175 tenaga kerja muda penciptaan wirausaha baru turun menjadi 2180 ini yang benar yang mana, ketika yang pertama dikatakan 3000, yang ini yang ada foto kopi ini menjadi 2180, kalau saya tidak salah mata anggaran 2175 itu kan Rp.323,7 miliar kira-kira seperti itu, demikian juga dengan pemberdayaan padat karya produktif, dimana disini di yang lalu itu rinciannya disampaikan jumlah orang 9000 walaupun ini mungkin lebih *alhamdulillah* kemudian menambah ya menjadi 75.024 orang.

Jadi, saya ingin bertanya mengapa ada perbedaan? Apakah salah pengetikan yang terakhir yang benar atau yang belakang? Yang mana ini? Karena terus terang saja bagi kami jumlah orang ini penting, karena menyangkut mata anggaran, mengapa mata anggarannya besar terus jumlah orangnya turun atau mata anggarannya sama, jumlah orangnya bertambah, itu sebagai catatan yang pertama.

Kemudian, yang kedua, mengenai kebijakan. Saya meminta penjelasan barangkali karena di beberapa waktu yang lalu program padat

karya produktif dan padat karya infrastruktur itu adalah program yang dilaksanakan oleh pusat, sementara kami mendengar dari beberapa teman dari daerah bahwa itu akan menjadi program daerah, nah pertanyaan kami ini adalah apa yang mendasari berpindahnya program-program ini, seperti itu Bu, karena terus terang saja karena anggarannya ini kan memakai anggaran pusat, jadi kan alangkah tidak logis ketika membawa anggaran di pusat kemudian langsung ke daerah, sehingga jangan-jangan ini di pusat tiba-tiba ada bagian yang tidak punya pekerjaan di Bina Penta misalnya karena itu semua sudah berpindah ke daerah, sementara saya tahu dengan DAK sendiri dan DAK itu akan bertambah, kebetulan di Badan Anggaran Besar DAK akan lebih ditambah nantinya, banyak diselenggarakan program-program seperti yang diadakan padat karya produktivitas infrastruktur, contohnya Departemen Sosial mengadakan hal yang sama, jadi mereka pun tidak menyelenggarakannya di daerah, mengapa bisa berbeda dua Kementerian ini? Jadi di Departemen Sosial bisa, di pusat kemudian Depnaker kenapa itu menjadi di daerah?

Tentunya ini kami perlu menyampaikan mengapa oleh karena menurut hemat kami bahwa sebetulnya kebijakan itu pun kalau ditempatkan di daerah yang konon katanya untuk daerah-daerah miskin, terluar kemudian juga daerah yang kuranglah kira-kira seperti itu tetapi sepengetahuan kami juga dari daerah, kami contohkan kebetulan daerah pemilihan kami Jawa Barat IV, kami mendapatkan berita makanya dalam kesempatan ini kami bertanya Jawa Barat itu yang mendapatkan hampir semua itu adalah Bogor dan Cianjur, sementara kabupaten kami Sukabumi itu kan daerah tertinggal, jadi apa ukurannya? Apa klasifikasinya? Belum Teman-teman yang lain kalau daftar itu dilihat oleh kami, jangan-jangan Teman-teman daerah tertinggal yang lain tidak dapat, mungkin yang di Majalengka atau dimana begitu juga Teman-teman yang di Indonesia Timur, artinya apa dasarnya? Apa ukurannya? Apakah mungkin di daerah pemilihan tertentu mungkin jangan-jangan ada siapa barangkali, yang kuat barangkali, apakah dia pejabat eksekutif yang tinggi barangkali? Karena kami melihat dasarnya apa begitu kami ingin tahu, karena kalau dibidang daerah tertinggal tetapi daerah kami tidak, belum mungkin juga daerahnya Pak Ketua atau mungkin juga yang di Sulawesi, yang di Papua dan sebagainya sehingga daripada ini menimbulkan ukuran-ukuran yang menurut hemat kami ini menjadi tidak jelas kenapa ini tidak dikembalikan ke pusat sehingga kita bisa berbicara paling tidak Teman-teman yang disini semua masing-masing tahu daerah pemilihannya yang kurang itu dimana, ya terus terang saja kalau daerah yang tidak kurang atau tidak tertinggal atau tidak terluar itu tidak mendapatkan, bisa diberikan program lain, oleh karena apa? Karena yang kami katakan tadi setahu kami DAK ditambah untuk yang terluar, tertinggal, miskin dan sebagainya, jadi seperti itu Bu.

Beberapa angka-angka ini bagi kami masih belum bisa memberikan kejelasan, paling tidak mungkin tidak semua teman bertanya tetapi sebenarnya Teman-teman ingin bertanya juga bingung apa yang ditanyakan, dilihat dari sini, jadi maksudnya bisalah kiranya diberikan agar bagi Teman-teman yang baru khususnya mempunyai kemudahan untuk paham *oh Bina Penta itu programnya ini, oh Bina Lattas seperti ini, oh anggarannya seperti itu*, bagaimana mau diberikan persetujuan kalau Teman-teman sendiri jujur saja semua mengatakan kepada saya, *Bu tanya*

*ini tidak jelas, ini tidak jelas*, jadi mungkin mewakili Kawan-kawan supaya itu bisa melakukan pendalaman-pendalaman.

Kemudian juga, untuk Pak Dirjen Bina Lattas, mohon maaf Pak ya memang tadi Bapak katakan mohon maaf dari pertama kali tetapi terus terang laporan yang Bapak sampaikan kepada kami sangat tidak lengkap dibandingkan dengan Bina Penta, mungkin saja Pak, Bina Penta mungkin karena sudah melakukan perbaikan-perbaikan walaupun kami sibuk membedakan lama dan baru, lama dan baru nah itu tetapi sudah agak menggambarkanlah kira-kira hanya mungkin perlu detail karena bagaimana pun semakin itu rinci dan bisa dengan mudah dipahami, akan semakin cepat persetujuan diberikan tetapi kalau tidak, saya yakin Teman-teman tidak mau memberikan persetujuan karena merasa tidak tahu, tidak paham kurang lebih seperti itu. Dari Bina Lattas juga ketika itu kami ingat Pak ada suatu program yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kalau tidak salah, tukang ojek, semacam itu kalau saa tidak salah ya, yang miskin dan sebagainya dengan suatu bantuan agar supaya dia bisa meningkatkan permodalan sehingga dia bisa meningkatkan kemampuannya atau mungkin produktivitasnya meningkat, nah ini apakah sekarang juga ada? Artinya kalau saya ingin menggambarkan kepada Bina Pentad an Bina Lattas adalah sangat penting untuk memikirkan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pusat untuk bisa ada *spend control*, mengapa saya katakan? Kalau tidak tergambar jelas program bantuan ini, nanti semua program ini diambil oleh Departemen lain, bayangkan saja yang namanya Departemen Diknas itu mau memberikan LPK kemudian padat karya produktif dibuat juga sama Departemen Sosial karena apa? Karena seharusnya dari Depnaker ini merancangannya betul-betul utuh, karena sistem anggaran kita ini adalah *money, follow, function* nah yang namanya tenaga kerja kan ada di Kementerian ini bukan di Sosial atau di Diknas, nah mungkin ini terjadi karena kurang fokus dan serius untuk menggarap program-program yang sifatnya bantuan memberdayakan masyarakat sehingga diambil oleh Departemen lain dan itu dianggarkan, padahal namanya tenaga kerja, mau dikatakan disini tenaga kerja pemuda, di Diknas juga dikatakan tenaga kerja putus sekolah, apa bedanya? Intinya itu kan tenaga kerja, pengangguran, di Departemen Sosial orang hamper miskin, setengah miskin itu kan tenaga kerja, jadi kalau kita tidak serius untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, yang kami khawatir nanti semakin kecil skup daripada Kementerian ini, karena definisinya itu dengan program-program seperti itu diambil oleh Kementerian-kementerian lain sementara sepengetahuan kami itu ditarik dan menjadi program Kementerian Tenaga Kerja, mau dia pemuda, putus sekolah, setengah miskin, hamper miskin atau pun miskin bukan berarti itu menjadi kewajiban sosial pemerintah tetapi itu adalah ranah daripada Kementerian Tenaga Kerja.

*...(rekaman terputus)....*supaya bisa memperbaiki ini dan juga kami ingin lihat disini supaya bisa perbaikan itu bagi Teman-teman memberikan persetujuan kalau seperti ini terus terang saja bagi yang mengerti mungkin agak lebih mudah tetapi jika disini memang adalah pengambil kebijakan dengan berbagai latar belakang, jadi tolong dimaklumi kami tidak berbicara pada tataran misalnya kemampuan untuk tenaga kerjanya sama seperti



Bapak dan Ibu, tetapi ini kebijakan ada pada Teman-teman semua yang mengeluh kepada saya bahwa sangat sulit memberikan persetujuan karena tidak mendapatkan gambaran yang menyakinkan hati.

Demikian kiranya.

Terima kasih.

Mohon maaf apabila ada salah kata.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Selanjutnya yang terhormat Ibu Nihayatul Wafiroh.

**F-PKB (Hj. NIHAYATUL. WAFIROH, MA) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi semuanya.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI,  
Yang terhormat Ibu Dirjen Bina Penta dan Bapak Dirjen Bina Lattas  
dan jajarannya.**

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kalau tadi sudah detail sekali Ibu Asmara dan Kawan-kawan lainya menjelaskan tentang pentingnya persoalan untuk mendetailkan jumlah dana-dana yang tertulis disini, saya mungkin akan menyoro hal lain Pak Dirjen. Yang pertama, untuk Bina Penta, kalau tadi Ibu hanya memberikan sekilas mengenai soal difable dan perempuan, mungkin saya perlu diperjelas lagi tentang bagaimana sih tentang penempatan Kawan-kawan difable dan juga Kawan-kawan waria, waria kenapa saya perlu mengatakan waria karena bagaimana pun mereka Warga Negara Indonesia, mereka adalah Warga Negara Indonesia yang keberadaannya apa pun orientasi seksualnya, juga suku bangsanya itu juga tetap menjadi tanggung jawab Negara, Negara harus hadir disitu. Nah, disamping itu ada hal yang lain, yang pertama adalah soal pasar kerja, beberapa waktu yang lalu beberapa kawan dari Komisi IX DPR RI ini pernah ditanya saya ini kalau ke daerah sering ditanya kalau saya ingin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dimana, saya sempat ke daerah Dapil saya di Bondowoso di Disnaker Bondowoso cukup baik untuk bagaimana mereka sangat pro aktif untuk memberikan elektronik informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan, bukan hanya di dalam kabupaten tetapi juga di luar negeri, nah mungkin hal-hal seperti ini yang perlu disosialisasikan hingga ke tingkat bawah yaitu sampai ke tingkat desa karena sebenarnya banyak di daerah-daerah Indonesia ini tidak semuanya di perkotaan Bu, tempat saya dengan di kecamatan itu jaraknya 12 km lebih yang itu kalau hujan seperti ini sulit dilewati dan sebagainya, ini bagaimana nanti informasi-informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan ini bukan hanya terpusat di provinsi maupun kabupaten saja tetapi bisa di akses hingga tingkat desa.

Saya *weekend* kemarin kebetulan bertemu dengan beberapa orang Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Malaysia dan juga bertemu dengan

Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, mereka memberikan usulan yang saya pikir luar biasa yaitu bagaimana sebenarnya kawan-kawan mahasiswa di luar negeri itu bisa diperdayakan untuk bisa membantu persoalan financial literasi Bu, jadi kita harus mengakui bahwasannya banyak sekali kawan-kawan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mereka hanya datang untuk bekerja tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengelola uang, karena mereka pinjam dan sebagainya. Nah, ini kawan-kawan yang PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) ini mereka banyak yang kuliah S2, S3 disana nah ini bisa dipergunakan untuk mensupport bagaimana memberikan training juga kepada kawan-kawan tenaga kerja yang ada di luar negeri.

Soal BLK dari Bina Lattas terima kasih Pak, disini banyak sekali program-program BLK kan selama ini kami yang di daerah ketika turun Reses ini pasti yang ditanya adalah BLK Pak, BLK-BLK itu banyak yang berupa gedung, tidak ada isinya, ada yang ada isinya tetapi secara SDM ininya kurang, SDM untuk fasilitatornya dan strukturnya itu kurang, nah itu mungkin yang perlu diperdalam lagi Pak untuk dana-dananya seperti apa tadi seperti yang sudah dijelaskan itu fasilitatornya fasilitator dalam apa saja Pak seperti itu, juga BLKnya mungkin perlu diperjelas juga ini trainingnya, latihannya latihan seperti apa, kalau kita dalam satu BLK, saya membayangkan kalau BLK itu menyediakan seluruh training tentu tidak mungkin Pak, ada training-training khusus yang dikhususkan untuk BLK tertentu dan juga BLK-BLK tersebut bagaimana agar bisa di akses juga oleh kawan-kawan difable dan kawan-kawan waria, lagi-lagi saya harus mengatakan itu karena mereka adalah kelompok-kelompok yang selama ini banyak disingkirkan tidak mendapatkan akses-akses tersebut. Untuk tadi ada pengembangannya salah satunya bagaimana juga menyiapkan masyarakat agar nantinya bisa berkembang secara ekonomi, di daerah saya banyak sekali *home industry* Pak dan *home industry* itu banyak dijual di Bali tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan pemberdayaan secara baik, saya pernah beli satu tas kecil itu yang dari ronce monte itu saya beli di Bali sekitar Rp.50.000,- ternyata ketika saya datang ke suatu daerah di Banyuwangi ternyata itu yang membuatnya cuman dikasih Rp.6000,- satu tas. Nah, saya membayangkan bahwa mereka bisa menjual sendiri tanpa harus melalui deretan-deretan apa itu di Bali, di Bali harus melewati orang lagi dan sebagainya dan sebagainya, jadi mungkin persoalan home industry ini bisa dikaitkan dengan marketingnya sekalian Pak karena itu sebenarnya kalau di Indonesia kuatnya adalah di home industry masyarakat-masyarakat di desa itu sangat luar biasa.

Soal ini juga Pak, mungkin juga persiapannya hanya untuk tenaga kerja tetapi juga yang pos tenaga kerja Indonesia, pos TKI, pos TKW, masyarakat kita kemarin bertemu dengan banyak orang yang mereka sudah dari TKI ke TKW dan sebelumnya saya mensupport mereka untuk membuat semacam group sendiri, kelompok tersendiri yang nantinya mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka apa, yang bisa kita support apa, jangan hanya kita memiliki program lalu kita kasih ke mereka karena belum tentu program yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi posisi kita lebih pada supporting system dalam artian mereka berkumpul, mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka baru kita yang datang memberikan program, jadi programnya bukan hanya

top brand saja. Soal kurikulum Pak, kalau dari BLK-BLK itu sepertinya kita membutuhkan kurikulum yang jelas bagaimana kita bukan hanya memberikan training-training skill tetapi juga kita memberikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, apa sih hak-hak mereka sebagai tenaga kerja di Indonesia maupun diluar negeri karena itu banyak sekali yang terlupakan, jadi masalah kurikulum mungkin perlu diperhatikan.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :**

Interupsi Pimpinan.

Boleh kan Pimpinan?

Kiranya kita langsung fokus ke anggaran, karena ini kita mau Paripurna ini kita, kalau soal pengawasan nanti lain lagi. Mohon ijin Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya terima kasih.

Memang tadi di awal kami sudah menyampaikan ke Anggota untuk fokus ke anggaran, pengawasan nanti kita atur di season berikutnya. Silakan Ibu Nihayatul di fokus.

**F-PKB (Hj. NIHAYATUL. WAFIROH, MA) :**

Kebetulan pas selesai itu tadi Pak.

Terima kasih interupsinya.

Terima kasih itu saja Ibu Dirjen Bina Penta dan Bapak Dirjen Bina Lattas.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Bukan karena di interupsi oleh Pak Abidin ya?

Pak Abidin yang bicara sekarang.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :**

Pimpinan, saya langsung saja.

Yang berkaitan dengan kan ada hal yang berdasarkan undang-undang kita harus perjuangkan, nah berkaitan dengan anggaran Bina Lattas dan Bina Penta saya ingin mendapatkan penjelasan seperti misalkan pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif dan padat karya infrastruktur itu 75 orang, nah penentuannya itu semacam apa? Kemudian, ada jumlah pembinaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu 430 lokasi, nah kalau katakanlah kami bisa dan selanjutnya masih ada, kalau kami bisa kriteria paling tidak itu, kemudian tempatnya dimana paling tidak kita bisa menyampaikan kepada Daerah-daerah bahwa ini nanti akan ada program

semacam ini, nah untuk kami Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas, kiranya Pimpinan perlu juga kita sampaikan jumlah Anggota kita dan daerah pemilihannya, daerah pemilihan dari jumlah Anggota Komisi IX DPR RI disampaikan kepada Dirjen Bina Penta dan Dirjen Bina Lattas, agar apa? Agar paling tidak dalam memutuskan ya kira-kira perlu dipertimbangkan, saya lebih konkrit saja begitu Pimpinan agar katakanlah kita bisa, pertama, kita turut mensukseskan program nawacita Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja dan juga kita bisa menyampaikan kepada konsituen kita bahwa Kementerian Tenaga Kerja itu domain pekerjaannya semacam ini loh dan kepada Dirjen-dirjen periode yang lalu kami juga banyak terima kasih juga sudah dibantu melalui program padat karya dan lain-lain. Nah, ada lagi ini keluhan Bu, saya dapat surat dari Tanah Toraja mohon ini itu di Direktur Standarisasi dan kompetensi dan program pelatihan tenaga kerja, ini Pak Muhammad Duri masih ya? Itu nanti suratnya akan saya berikan, itu ada dari lembaga bina mitra Toraja kemudian lembaga mandiri yang nanti saya berikan suratnya nah ini soal berkaitan dengan pembatalan sepihak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, nah ini mungkin nanti akan saya sampaikan sebagai katakanlah ini untuk mohon untuk ditindaklanjuti.

Nah, yang pelatihan-pelatihan itu juga bisa juga kita ikut serta karena di daerah itu banyak kelompok-kelompok yang perlu diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, saya kira konkrit Pimpinan daftar nama kita, daerah pemilihan, serahkan ke Dirjen Bina Penta, ini mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, kalau 430 kota kabupaten nah ada bukan dapat bagian karena tentu dia punya kriteria tetapi paling tidak ini aspirasi kami ini tolong diperhatikan. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Tengku Khaidir.

**F-GERINDRA (KHAIDIR) :**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan serta segenap Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu dari Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas.**

Langsung saja Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu dari Kemenaker, kehadiran kami disini adalah dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah adalah kemampuan daerah kita berbeda-beda, tadi pagi saya baru tiba dari Aceh dan ini agak sedikit berbeda, kita sudah di dera oleh konflik sekian puluh tahun kemudian juga 10 tahun yang lalu kita dihantam oleh tsunami tetapi yang ingin disampaikan dalam forum yang berbahagia ini adalah di Aceh itu ada beberapa BLK yang kami lihat itu mati suri Pak,

artinya jalannya pun tidak, tidak ada fasilitas, tidak ada instruktur tetapi yang lebih miris lagi ada satu BLK yang di Lauksumawe dan itu sudah terbakar saat konflik dan sampai sekarang tidak ada sentuhan apa pun, kemudian ada satu lagi di Aceh Utara dibangun baru bangunannya ada tetapi tidak ada alat satu pun, makanya ini mohon dicatat oleh Bapak-bapak dari Dirjen Bina Lattas bahwa ini sesuatu yang mungkin berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang lain, makanya dengan demikian kita mohon diperhatikan serius karena kehadiran kami disini adalah dalam rangka memperjuangkan Aceh Utara itu decade 80an itu petro dollar, semua mata memandang kesana karena dulu Exxon hebat atau mobile oil, Arunnya bagus, ....(tidak jelas)...PT.Kertasnya bagus tetapi sekarang tinggal besi tua Pak, orang-orang yang bekerja dengan kemampuan terbagus disana itu jadi terlunta-lunta tidak bisa dimanfaatkan ilmunya, maka apakah peningkatan kalau dikasih DOBnyalah atau membina kawan-kawan yang atau mantan pejuang disana, itu sekarang mereka pengangguran Pak, sudah 10 tahun perdamaian tetapi mereka tidak punya lapangan kerja dan saya tidak menduga tetapi kemungkinan ke depan ini akan jadi persoalan ke depan, persoalan yang menyangkut dengan perut atau pekerjaan ini mohon ada perhatian serius dari kita disini agar pengalaman terjadi di Papua dan pengalaman terjadi begitu lama di Aceh jangan pernah terulang lagi.

Kami kira demikian Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Imam Suroso.

**F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH.,MM) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Ibu Dirjen Bina Penta, Pak Dirjen Bina Lattas dan  
jajarannya.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Imam Suroso A-172 Dapil Jawa Tengah III, Pati, Rembang, Blora dan Grobogan.

Dari sini saya lihat untuk Dirjen Bina Penta yang anggarannya APBNP 220 miliar, total pagu 1,073 triliun padahal ini sangat banyak tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Bina Penta. Nanti mohon Ibu Rina dijelaskan karena tanggungannya banyak tetapi anggarannya sedikit tetapi ini juga lebih sedikit lagi, berkaitan dengan tugas fasilitas perlindungan TKI Dirjen Bina Penta menargetnya untuk kasus hanya 159 padahal kasus TKI cukup

besar berdasarkan data Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI diluar negeri sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2014 tercatat sejumlah 204, 50 kasus itu WNI dan PHI diluar negeri yang kehilangan tetapi *alhamdulillah* sudah bisa diselesaikan 9290 kasus. Sementara ini masih ada kasus 3160 kasus masih ditangani Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI diluar negeri. Nah, ini permasalahannya kan masih ada sekitar 3000 kasus ya kok hanya Ibu memprogram 159 kasus itu bagaimana, nah pertanyaannya kenapa Ibu Dirjen Bina Penta Ibu Rina menargetkan fasilitas perlindungan TKI hanya 159 kasus padahal kasusnya kurang lebih ada 3000an Pak, itu kenapa kok cuman sedikit apa karena dananya atau karena sistem advokasinya atau bagaimana? Ini kan manusia-manusia orang WNI ini harus dilindungi.

Terus yang kedua, untuk kasus-kasus apa saja yang akan diutamakan perlindungan oleh Ibu Rina apa saja itu, nanti tolong dijelaskan karena kasus itu jangan sampai WNI ini ditampung di luar negeri tetapi *alhamdulillah* Ibu Rina kemarin sudah berhasil yang 2 orang itu harusnya digantung, perjuangan Ibu Rina dan Komisi IX DPR RI aman jadinya tidak jadi digantung. Itulah advokasi yang seperti itu yang saya maksud Ibu Rina. Keberhasilan itu perlu diulang, kalau perlu dianggarkan ya dianggarkan yang lainnya nomer 2, yang penting nyawa itu karena harga diri daripada Bangsa Indonesia.

Kemudian, Ibu Rina dan Dirjen Bina Lattas, saya sepaham setuju dengan Teman-teman Komisi IX DPR RI apa pun bentuknya bahwa supaya meminimalisir kasus, meminim kasus yang di luar negeri baik itu pembunuhan, baik itu pencurian dan sebagainya itu sangat butuh sosialisasi-sosialisasi, mereka-mereka itu biasanya SDM rendah terus dikirim kesana, kemudian oleh pengirim yang ilegal, itulah yang menjadi kasus, menjadi beban masalah negara, masalah anggaran negara membengkak seperti itu maka disinilah dibutuhkan sosialisasi sampai ke ujung, nah ini fungsi dan peran Ibu Rina dan Dirjen Bina Lattas diprogramkan, dianggarkan, sosialisasi seperti tadi teman kita yang dari PDI Perjuangan tadi perlunya sosialisasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Teman-teman Komisi IX DPR RI, karena Teman-teman Komisi IX DPR RI tahu persis permasalahannya, dengan sosialisasi seperti itu saya yakin itu akan mengurangi kasus-kasus luar negeri, otomatis mengurangi anggaran itu menurut saya.

Kemudian, menurut saya yang kaitannya dengan apa yang di daerah-daerah kerja yang kerja banyak orang itu juga perlu juga mengandung sosialisasi memperluas pekerjaan. Kemudian, untuk Bina Lattas saya juga minta untuk BLK-BLK dihidupkan Pak dengan adanya APBNP yang walaupun sedikit tetapi dimaksimalkan Pak, BNP2TKI saja nyorotin BLK, kita itu banyak ada yang timbul ada yang tumbuh, ada yang macet, mesinnya sudah tua dan seterusnya padahal itu sumber daripada lapangan pekerjaan.

Jadi, sementara saya itu dulu, intinya saya minta Komisi IX DPR RI dengan Naker pro aktif turun ke bawah, dianggarkan, diprogramkan turun ke bawah.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.  
Yang mendaftar sudah selesai.

**F-PAN (M. ALI TAHER. P) :**

Pak Ketua, saya...

**KETUA RAPAT :**

Oh al mukarram, singkat.

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER. PARASONG, SH.,M.Hum) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama, saya mohon maaf terlambat bukan kesengajaan tetapi informasinya itu di Aryaduta jadi saya terpaksa tetapi tidak apa-apalah.

Pertama, untuk Bina Penta di halaman 34 kita setuju saja dengan penambahan anggaran sekaligus kegiatan pada nomer 1 itu pengembangan keterampilan dan wirausaha kaum muda, saya kira tetapi saya ingin mengomentari itu saya kira rasional, cuman dipertajam pada posisi target dan sasaran, setelah *output* pelatihan itu mau kemana, jangan sampai latih selesai latih kemudian cari kerja susah, akhirnya menimbulkan beban kerja yang baru.

Saya mohon maaf nama saya Muhammad Ali Taher Parasong dari Banten III, kabupaten Tangerang, kota Tangerang dan Tangerang Selatan, dari Partai Amanat Nasional, jadi saya kira faktor *ouputnya* itu yang penting, *output, outcome*, kita paham ada input, proses output, outcome dan saya kebetulan membina beberapa BLK di Tangerang itu yang sepatu, kegiatan latihan sepatu-sepatu. Setelah dilatih kemudian tidak ada *outcome* lanjutannya sehingga latih selesai tidak ada modal, tidak ada akses dan seterusnya itu, jadi saya kira perlu dipertajam itu.

Yang kedua, pada posisi program yang kedua di halaman 35 itu ada kata prioritas lokasi di daerah Indonesia Timur, saya setuju karena saya orang NTT, daerah perbatasan setuju, kantong TKI setuju, kaum PHK setuju ....(*rekaman terputus*)....di Banten itu juga banyak orang yang tidak mampu, kalau tidak mempunya orang Indonesia Timur kenapa sedikit, di Banten itu lebih dari 3,5 juta manusia jadi punya problem yang luar biasa, jangan melihat Tangerang Selatan yang mulai maju, tetapi kabupaten Tangerang itu luar biasa, saya kemarin itu menghadiri anaknya Kepala Desa untuk mencapai kesana itu cuman 20 km hampir 2 jam, musim kering itu air tidak ada. Jadi, jangan-jangan nanti semut di seberang lautan itu nampak gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu, perlu *mapping, mapping* di Daerah-daerah yang banyak penduduk dan problem sosial juga besar, kalau di tempat saya NTT memang banyak kemiskinan karena sumber daya alam terbatas tetapi masyarakatnya sedikit, jadi oleh karena itu pandangan saya perlu membuat program itu rasional, obyektif dan profesional.

Kemudian, yang di halaman 37 itu perlu dipertajam maksud dan tujuan dari kegiatan itu, pemberdayaan dengan aset produktif dan seterusnya itu perlu dipertajam. Terakhir, di bagian akhir Bina Penta itu ada alokasi APBN 220 miliar itu dialokasikan sebagai bagian dari program pengembangan penghidupan berkelanjutan yang dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, apa relevansinya dengan program kementerian, mikir diri sendiri saja belum tuntas apalagi mikir yang lain, kira-kira begitu, meskipun ini juga sama-sama program pemerintah tetapi mungkin prioritasnya itu dipertajam ke dalam dulu baru keluar sehingga bentuknya kemitraan itu diprioritaskan ada P1, P2 dan P3, bukan partai persatuan pembangunan, jadi prioritas 1, 2 dan 3, jadi saya kira begitu.

Kemudian, saya belum bisa berpendapat di Dirjen Bina Lattas, saya akan sangat mendalami, saya baru mendapatkan tetapi saya kira ini problem-problem lintas negara itu menjadi penting, saya kira faktor perlindungan jaminan itu hak-hak warga negara diluar itu menjadi sangat penting kebetulan saya sekretaris Fraksi PAN di MPR RI, kita membicarakan dengan sungguh-sungguh, tolonglah angkat harkat dan martabat warga negara Indonesia diluar itu supaya mulai mengurangi Tenaga-tenaga kerja yang *unskill* menuju kepada tenaga kerja yang *skill*, oleh karena itu mungkin ada credo, ada icon yang perlu kita bangun bahwa mengirim tenaga kerja yang *skill* adalah kebanggaan bagi kita dan mulailah budak-budak itu istilah orang Malaysia itu mulai dikurangi, harga diri kebangsaan kita menjadi tergadaikan, maka ini saya akan mendalami ini betul-betul, dengan sungguh-sungguh bersama MPR RI membicarakan ini dimana letak Pancasila disitu, dimana letak filosofi kebangsaan, nah ini sebenarnya ada kaitan, ada relevansinya, jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Dirjen dan dengan teman-teman kira-kira relevansi, menghargai penempatan tenaga kerja disana, kemudian bagaimana perlindungan jaminan hak-hak kebangsaannya itu yang perlu kita lihat itu. Saya lebih bagus kalau misalnya bersama dengan Dirjen Bina Penta dan Teman-teman lainnya pertajam tenaga kerja pada buruh tani, nelayan di dalam negeri, mungkin itu tenaga kerja yang *unskill* lebih dominan dibandingkan dengan yang lain-lain, berhentilah mengirim tenaga kerja, ya "budak-budak" dianggap di luar negeri malu kita rasanya itu, saya ini cukup ya? Oleh karena itu, karena cukup maka dipertajamlah program itu.

Terima kasih Pak Abidin rasaukupnya itu.

*Nasrun minallah wa fathun qorib.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

Ya tadi kita sampai jam 12, kita perpanjang setengah jam ya jawaban sekaligus kesimpulan.

#### **F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi):**

Pimpinan, tambah sedikit saja.



**KETUA RAPAT :**

Ya silakan fokusnya ke anggaran.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi):**

Ya fokus ke anggaran dan program.  
Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya langsung saja kepada Dirjen Bina Penta maupun Dirjen Bina Lattas, mendukung apa yang disampaikan oleh Teman-teman sebelumnya bahwa fokus kita hari ini adalah anggaran dan program, saya belum sama dengan Teman-teman yang lain, mendukung bahwa kami belum mendapatkan laporan atau suguhan yang luar biasa untuk bentuk program-program yang ada di masing-masing Dirjen, jadi artinya belum jelas disini apa yang disuguhkan oleh dua Dirjen ini, harapan kami terutama yang baru-baru ini kami berharap kami mendapatkan pemahaman yang jelas tentang dan rincian yang jelas tentang program yang ada di Dirjen Bapak secara detail, jadi kami mendukung bahwa Bapak beserta jajaran buatlah sebuah matriks dan program yang jelas dan rinci seperti apa yang akan Bapak lakukan selama 1 tahun ke depan ini dengan anggaran yang ada, itu yang pertama.

Yang kedua, kaitannya dengan koordinasi dengan dinas setempat di kota maupun kabupaten, mohon maaf khusus di daerah saya terutama di Dapil saya Garut dan Tasik ini koordinasi dengan dinas disana sangat sulit Pak, jadi kami berharap bagaimana ini kami akan melakukan fungsi pengawasan kalau koordinasi kami sangat sulit, apalagi meminta data mengenai siapa penerima bantuan dari program Bapak, karena selama ini yang saya tahu program yang Bapak berikan itu koordinasinya langsung ke dinas dan dinas langsung mencarikan siapa penerimanya itu dan saya secara pribadi tidak berhenti disitu bahwa kami koordinasi sangat sulit, kami mendapatkan data juga sangat sulit, kemudian apa yang kami lakukan kami langsung turun ke lapangan dan melihat langsung siapa penerima itu dan saya menilai bahwa penerima itu tidak tepat sasaran dan kadangkala juga penerima bantuannya itu ya itu-itu saja, namanya saja yang diganti Pak. Nah oleh karena itu, kami berharap contoh saja ya padat karya, pelatihan-pelatihan program itu, makanya mungkin karena Teman-teman belum paham mengenai program itu kami berharap Bapak dan Ibu membuat matriks program yang rinci sehingga kami mendapatkan itu dan kami mohon Bapak libatkan Komisi IX DPR RI karena kami punya konsituen, kami tahu daerah kami siapa itu yang lebih berhak mendapatkan bantuan itu karena saya yakin apa yang Bapak buat itu sudah sangat luar biasa dan hanya tinggal Bapak koordinasi dengan kami, kemudian kami akan mengawasi dengan sebaik-baiknya program dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari program Bapak bisa tersalurkan dengan baik.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Cukup ya?  
Cukup.

**F-GERINDRA (ROBERTH ROUW) :**

Pimpinan, interupsi.

**KETUA RAPAT :**

Ya Pak Roberth.

**F-GERINDRA (ROBERTH ROUW) :**

Ya belum afdol kalau Papua belum ada Pimpinan.  
Terima kasih.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI dan jajaran.**

**Yang saya hormati Anggota Komisi IX DPR RI.**

**Yang saya hormati Ibu Dirjen Bina Penta dan Bapak Dirjen Bina Lattas dan jajaran.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya cuman sedikit saja karena tadi teman dari Aceh sampaikan, saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh teman saya dari Aceh, kami di Papua juga sama seperti itu bahwa banyak balai latihan itu BLK-BLK yang terbengkalai, tidak jelas kemana arahnya begitu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dan janji sumpah kami bahwa memperjuangkan konsituen kami, daerah kami, saya minta mungkin Bapak Bina Penta bisa memberikan data-data tentang balai latihan yang ada di provinsi kami agar kami tahu dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi bahwa tolong kami dilibatkan juga untuk di daerah kami, karena kami yang tahu juga disana, kami yang turun bersama rakyat disana ya untuk bisa bersama-sama Bapak untuk membuat program untuk masyarakat kami, seperti kemarin saya datang ke daerah saya itu ada satu kampung, tiga kampung itu disitu menghasilkan buah durian yang begitu banyak sampai terbuang-buang disitu, alangkah baiknya kalau ada balai latihan yang untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan penghasilannya melalui hasil buminya, pemerintah memberikan program-program untuk penanaman buah dan sebagainya dan itu dilaksanakan dengan baik tetapi hasilnya sekarang terbuang-buang tidak tahu mau dikemanakan. Jadi, seperti itu Pak, mungkin nanti saya bisa bersama Bapak untuk bisa membuat satu balai latihan di daerah sana, di daerah Yapen itu agar bisa tepat gunalah, masyarakat bisa mempergunakan hasil-hasil buminya untuk bagaimana

bisa meningkatkan kehidupan mereka. Saya kira itu Pak, mungkin kami bisa dilibatkan. Saya kira itu saja Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Cukup?

Cukup ya?

Kami persilakan Ibu Dirjen untuk merespon secara singkat, lalu dilanjutkan dengan Bina Lattas.

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Pimpinan.

Kami akan menjelaskan pertanyaan yang disampaikan baik oleh Ibu Siti Masrifah, Ibu Irma kemudian Ibu Okky dan Ibu Dewi Asmara, Ibu Nihayatul

Wafiroh mengenai disabilitas serta Pak Abidin, Pak Khaidir serta Pak Ali Taher.

Bahwa program yang ada di Direktorat Bina Penta ini memang terkait langsung dengan informasi pasar kerja dimana informasi pasar kerja ini secara keseluruhan setiap saat itu selalu di *update*, ternyata bahwa memang kami memiliki dari seluruh provinsi belum optimal di dalam pelaporan dalam rangka baik pengangguran, baik karakteristik, jumlah angkatan kerja baik pendidikannya, baik apalagi minatnya, minat mereka untuk bekerja dan menggerakkan potensi daerah. Oleh karena itu, Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan serta Ibu Anggota Dewan yang terhormat, inilah yang sedang kami lakukan, melakukan *grand design* bagaimana untuk Tahun 2015-2019 penempatan itu adalah lebih kepada penempatan di dalam negeri dan juga penempatan dikurangi untuk keluar negeri dan kami sudah membuat juga *grand design* tenaga kerja domestik. Yang pertama, bahwa apa yang menjadi kendala dari pusat, dari Kementerian Tenaga Kerja ini adalah memang keberadaan dinas tenaga kerja ini yang tidak diimbangi juga oleh petugas-petugas dinas tenaga kerja yang setiap kami melakukan, setiap kami melakukan pemberdayaan terhadap pengantar kerja ini langsung dipindah Pak, jadi ini persoalan dinas tenaga kerja di daerah sehingga kami tidak bisa melakukan optimalisasi terhadap data yang akan dilakukan sebagai analisis pasar kerja. Kami terima kasih Pak, memang kalau kami melihat dari seluruh jumlah angkatan kerja khususnya yang SD ke bawah dan SMP ini memang harus diprioritaskan untuk mereka mendapatkan akses kerja dan juga pemberdayaan, khusus di Indonesia Timur ini sudah menjadi prioritas dan khususnya di kantong-kantong TKI. Kemudian, bagi petani dan nelayan ini memang juga menjadi persoalan daripada akses kesempatan kerja yang terbatas, nah untuk daerahnya sepertinya hampir semua daerah tenaga kerja yang mengalami tingkat pengangguran yang tertinggi ini memang kalau kami melihat memang semua diwakili oleh daerah mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi daerah-daerah yang perlu kita perjuangkan untuk mendapatkan akses pasar kerja yang fleksibel dan oleh karena itu kami akan meningkatkan peranan bursa kerja di daerah, saat ini kami sudah

memfasilitasi 2 tahun terakhir ini kami memfasilitasi, memberdayakan bursa kerja, dinas tenaga kerja tidak hanya sebagai dinas tetapi sebagai bursa kerja, disitu ada pelayanan bursa kerja online dan kami juga terima kasih termasuk ini adalah program yang digagas oleh Pak Dede Yusuf untuk Jawa Barat dan ada beberapa daerah Pak itu juga sudah mendapatkan ISO 90001 dan kita berharap nanti dari 22 daerah yang sudah mendapatkan ISO ini bisa ditingkatkan menjadi beratus-ratus atau 415.

Khusus di Indonesia Timur kami sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi, bursa kerja sepertinya tidak bisa hanya diberikan di dinas tenaga kerja karena mungkin ada persoalan antara lain biaya *maintenance*, biaya listrik, biaya internet ini tidak tersedia di dinas tenaga kerja, oleh karena itu maka memang khusus untuk operasional dari bursa kerja kami masih mensubsidi, antara lain yang kami sampaikan tadi di 400, kami masih memiliki 400 lebih Satker yang tidak bisa kita lepas karena ini memang permintaan daerah, karena mereka masih bergantung, sementara banyak dinas tenaga kerja ini memang fungsinya tidak optimal antara lain pengantar kerja yang tidak ada, yang kedua, memang fasilitas dan yang ketiga, itu memang AKBD di dinas tenaga kerja ini khusus untuk mengurus masalah fasilitas informasi dan akses informasi untuk tenaga kerja muda, wanita dan juga kepada disabilitas ini memang sangat terbatas bahkan di kantong-kantong TKI kami melihat dan mengecek dinas tenaga kerja itu paling banyak itu Pak mohon ijin ini hanya anggarannya 30 juta untuk mengelola tenaga kerja yang ada di daerah masing-masing.

Nah, oleh karena itu, kami memang masih memiliki Satker yang cukup gemuk sementara dalam audit akuntabilitas lebih baik ini semakin ramping satuan kerjanya namun kami tidak bisa karena ini karakteristiknya sangat spesifik menangani informasi, lowongan, supply dan demand. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pasar kerja, angkatan kerja yang SD, SMP sebagaimana yang kami sampaikan tadi ada dua strategi yang didorong yakni informal kita dorong untuk diberdayakan di Bina Lattas tetapi khusus untuk yang rentan tadi khususnya yang distabilitas tadi Ibu ini juga menjadi program prioritas kami yang akan kita ajak mereka untuk melakukan pemberdayaan, karena tidak mungkin mereka mendapatkan pelatihan sebagaimana skema yang ada di Bina Lattas masuk ke BLK, jadi ini programnya menjemput lokasi-lokasi khususnya di kawasan Ibu-ibu daerah nelayan pinggiran, kemudian petani dan khusus untuk wanita angkatan muda, ini diajak mereka untuk berwirausaha Pak sehingga *stap up* yang akan kita lakukan dan tadi ada pertanyaan juga mengenai kenapa ada biaya 10 juta? Ini adalah untuk membiayai motivator dan pendamping, kalau sebagai uji coba di tahun itu kami akan memberdayakan 24.000 ya mudah-mudahan target kami yang bisa berhasil ini paling tidak diatas 50 sampai 60%, jadi inilah yang harus dilakukan pendampingan sehingga transportasi dan akomodasi dari motivator dan pendamping itu menjadi sangat penting, jadi 500 pendamping dan 500 motivator, untuk yang pendamping ini adalah Tenaga-tenaga kerja Sarjana yang memang mereka sendiri adalah penganggur, nah ini kita perdayakan tetapi mereka adalah Sarjana dari Fakultas Ekonomi mungkin tidak kita berikan *leaving cost* sebesar 10 bulan dan juga kita berikan 1 orang pendamping ini 3 juta.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Pimpinan, interupsi.

Ya terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Ibu Dirjen.

Jadi, yang 1000 ini 500 untuk pendamping, 500 untuk motivator? Sementara 500 untuk pendamping dan 500 untuk motivator itu anggaran per orangnya untuk rekrutmen dan pembekalan itu Rp.7.500.000,- anggaran Rp.7.500.000,- ini untuk apanya Ibu Dirjen.

Terima kasih penjelasannya.

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Ibu Okky.

Ini adalah untuk mereka dilakukan peningkatan kapasitas di Balai besar di Lembang sehingga akomodasi Rp.10 juta dan biaya yang lainnya ini adalah memang yang khusus untuk mendampingi untuk program yang 24 ribu, kami punya balai besar wirausaha di Lembang, ini yang akan diaktifkan menjadi tempat dan bahkan Kementerian lain sudah meminta Bu dari UKM meminta bahwa di posisi balai besar perluasan kesempatan kerja di Lembang menjadi BLK (Balai untuk Kewirausahaan) dan kami akan start untuk tahun ini untuk memfungsikan dan disitu bekerja sama dengan IPB, ITB dan beberapa perguruan tinggi lainnya dan Institut Akademi Koperasi yang ada di Lembang.

Mengenai duplikasi program mungkin nanti lokasi kami nanti akan sampaikan secara tertulis, jadi mudah-mudahan dari semua Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI dapat mengawasi program ini dengan adanya program yang memang kita unggulkan sebagai yang dibiayai oleh APBNP. Mengenai anggaran yang sebelumnya di anggaran APBN 2015 ini nanti kegiatannya akan disampaikan secara tertulis karena kami dari disampaikan lokasi dan juga disampaikan target, rupiahnya belum kami sampaikan karena ini sudah dibahas sebelumnya, kami mohon maaf dan nanti kalau memang diperlukan kami akan sampaikan lokasi, jadi ini adalah dua paparan yang satu adalah APBN yang sudah disahkan sebelumnya dan ada lagi APBNP, .....*(suara rekaman rusak kecil sekali)*.....

**KETUA RAPAT :**

.....*(suara rekaman rusak kecil sekali)*.....

Silakan Bu dirangkumkan jawaban.

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Pimpinan.

Khusus APBNP ini memang punya kekhususan karena perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Penta kepada penambahan perluasan kesempatan kerja maka bentuk-bentuk perluasan kesempatan kerja antara lain pengembangan wirausaha, nah itulah kami akan fokus ke perluasan kesempatan kerja dengan mewujudkan program 24 ribu

wirausaha tetapi mungkin ini yang perlu menjadi catatan pada Komisi IX DPR RI dan Ibu Pimpinan bahwa kami menghendaki diadakan .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... jadi jangan sampai hanya tahun pertama kemudian tahun kedua dan tahun ketiga dari hasil evaluasi.

Kemudian, mengenai APBN, APBN ini memang berkaitan dengan padat karya produktif dan padat karya infrastruktur, khusus untuk padat karya infrastruktur sudah disepakati dalam trilateral dengan Bappenas, Kementerian Keuangan ini karena memang lokasinya jalan dan jembatan itu ada di daerah maka itu harus diberikan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan dan untuk lokasinya nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Berkaitan dengan lokasi untuk pusat dan daerah, kenapa proporsinya masih sekitar 30% dan 61%? Karena ini berkaitan dengan adanya program-program yang harus dilakukan berkelanjutan, misalnya di pusat melakukan pemberdayaan atau untuk bersama-sama dengan Bina, kemudian ada uji coba percontohan program, ada lagi yang pengembangan, jadi khusus untuk yang bekerja sama pusat dengan Bina ini adalah merupakan program pemberdayaan secara bersama, kemudian untuk percontohan dan pendampingan ini adalah khusus balai besar produktivitas yang ada di Lembang dan khusus untuk pengembangan dan kami juga membiayai satuan kerja dan 12 tenaga kerja di luar negeri. Berkaitan dengan mengapa khusus untuk anggaran di Direktorat Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri persentasinya tidak maksimal karena kami memiliki satuan kerja di luar negeri di 13 atase di 12 negara. Oleh karena itu, maka ada beberapa permasalahan yang dialami oleh atase, misalnya harus bekerja sama untuk memprioritaskan program di Kementerian Luar Negeri khususnya di perwakilan sehingga atase ini tidak optimal mengelola keuangannya karena memprioritaskan anggaran di perlindungan di Kemlu.

Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri fungsi dari atase tenaga kerja memang selama ini yang kami evaluasi sudah optimal dan mudah-mudahan ke depan kami akan mengoptimalkan fungsi atase karena terjadinya dua peraturan Menteri yang mengatur fungsi itu, kemudian sudah kami bicarakan juga dengan Bappenas sehingga *grand design* dari penempatan tenaga kerja luar negeri akan dibuat dan dengan fungsi-fungsi mengoptimalkan peran atase. Berkaitan dengan mengapa atase tenaga kerja tidak dapat menyelesaikan berbagai kasus, karena memang dilaksanakan oleh bidang konsuler dan khusus untuk tenaga kerja di luar negeri ada dua masalah, masalah yang .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... ini dilaksanakan oleh atase tenaga kerja tetapi masalah yang ilegal dan masalah yang WNI dan non .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... oleh atase tenaga kerja. Disamping itu, status dari atase, kami baru 4 yang punya status atase tenaga kerja dengan fasilitas diplomat, selebihnya adalah staf teknis yang artinya mereka tidak bisa melakukan akses misalnya ke kantor polisi, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi inilah sebabnya kenapa kasus-kasus tenaga kerja di luar negeri tidak dapat ditangani secara optimal, kami mengharapkan bahwa ada pemisahan yang jelas antara fungsi atase untuk menangani *labour causes* di luar negeri, bagi *non labour causes* misalnya kasus pidana dan lain sebagainya ini memang adalah ditangani oleh konsuler dan WNI dan tidak semua statusnya itu adalah Tenaga Kerja

Indonesia, mudah-mudahan nanti dengan adanya revisi undang-undang dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati ini bisa mempercepat status-status di luar negeri.

Mengenai asuransi Ibu Irma bahwa asuransi sesuai dengan Peraturan Menteri No.01 Tahun 2012 ini sudah dilaksanakan perbaikan, premi yang 400 ribu itu adalah resiko pada tahap pra pemberangkatan, pada saat pemberangkatan mereka dilatih kemudian tidak jadi berangkat ini preminya 50ribu, kemudian pada masa pemberangkatan selama 2 tahun ini 300 ribu dan 50 ribu pada pasca pemberangkatan, terkait dengan premi asuransi ini Kementerian Tenaga Kerja tidak mengelola secara langsung, ini dikelola oleh 30 perusahaan asuransi dan oleh 3 konsorsium, ada pun untuk penentuan 30 perusahaan kami Kementerian Tenaga Kerja bersama-sama dengan OJK untuk melakukan fasilitasi, evaluasi dan penggunaan, kami mendapatkan bahwa banyaknya kasus yang tidak tertangani di luar negeri, kasus-kasus di masa penempatan selama 24 bulan ini dikarenakan karena TKI sendiri ini yang pertama belum memanfaatkan akses yang telah tersedia untuk dioptimalkan dengan baik, jadi mereka masih butuh bantuan. Jadi, sehingga menyisakan permasalahan apa yang dilakukan di masa penempatan di 24 bulan ini sebagai pemegang KTA ini langsung kalau ada klaim yang dilakukan dan saat ini pelayanan yang ketiga konsorsium ini penyelesaian kami meminta dengan SOP yang ada bersama dengan otoritas jasa keuangan ini meminta untuk penyelesaian klaim 7 hari paling lambat untuk dilakukan penyelesaian klaim. Untuk yang meninggal dan lain sebagainya, ini sudah ditangani secara cepat dan memang masih memerlukan ada bukti-bukti, nah banyak juga yang tidak memegang KTA, tenaga kerja kita bukan anggota dari asuransi sehingga ini memang perlu ada sosialisasi bagi yang berasuransi itu yang mendapatkan tetapi yang tidak berasuransi tidak mendapatkan .....*(suara rekaman rusak kecil sekali)*.....

**F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :**

Interupsi Ketua sebentar.

**KETUA RAPAT :**

Ini soal pengawasan, saya kira kita tunggu dulu ya.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :**

Bukan Pak Ketua, ini bukan soal pengawasan yang saya mau sampaikan. Anggaran yang untuk APBNP Tahun 2015 Ibu, saya juga ingin memastikan bahwa untuk pengawasan terkait masalah asuransi tersebut juga kerjasama dengan konsorsium itu juga mesti dipastikan, karena kalau itu tidak dipastikan kejadiannya berulang-ulang terus, jadi begitu Ketua, bukan soal pengawasannya tetapi anggaran yang harus ada.

**KETUA RAPAT :**

Silakan dipersingkat Bu.

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Pak.

Kebetulan untuk APBNP Bu ini memang hanya diperuntukkan untuk pemberdayaan kewirausahaan, jadi mudah-mudahan nanti untuk pengawasan asuransi nanti kami lakukan revisi Bu.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Dirjen.

**DIRJEN BINA LATTAS :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan Komisi IX, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

Terima kasih atas saran dan masukkan beberapa hal yang tadi kita sudah bahas. Terkait pertanyaan akan kami coba menjelaskan sebagai berikut; pertama, terkait dengan kurikulum, kurikulum di dalam pelatihan BLK memang kita sudah coba mengevaluasi dan ke depan kita akan lakukan peningkatan kapasitas SDM tidak hanya sebatas dalam konteks peningkatan *skill*nya saja, tetapi juga akan kita berikan materi-materi yang terkait dengan peningkatan ...*(tidak jelas)*...ini penting, dalam konteks bagaimana meningkatkan tindakan perilaku yang memang dikehendaki atau diinginkan oleh pengguna. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan kita sudah tercermin di dalam APBN Tahun 2015 ada beberapa kegiatan, yang pertama adalah dalam konteks penyelesaian program BLK sebanyak penetapan program itu sebanyak 75 program, untuk .....*(suara rekaman rusak kecil sekali)*.....

Nah, di dalam penyelesaian inilah nanti didalamnya adalah masalah-masalah terkait dengan kurikulum, penggunaan kurikulum dalam aspek peningkatan kapasitas untuk membentuk sikap dan perilaku tenaga kerja kita.

Yang kedua, penjelasan tentang belanja barang non operasional sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan adalah sesuatu belanja yang tidak terkait dengan belanja modal, belanja pegawai, belanja operasional masuk di dalam kelompok barang dan operasional. Ini adalah tugas kelompok pembiayaan untuk membiayai aktivitas seluruh tugas dan fungsi .....*(suara rekaman rusak kecil sekali)*..... sebagai misal untuk membiayai pelatihan .....*(suara rekaman rusak kecil sekali)*..... sampai dengan bagaimana memberikan pelatihan untuk tenaga instruktur dan tenaga pengelola pelatihan.

12 skema sertifikasi yang mau diselesaikan di dalam konteks tema sertifikasi adalah 12 sektor menjadi prioritas di dalam konteksnya, jadi ada 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. Seberapa jauh alumni pelatihan yang sudah bersertifikat ini dapat diterima di industri, sertifikasi itu merupakan pengakuan kompetensi seseorang atau tenaga kerja terhadap kompetensi yang dimiliki sehingga dengan adanya sertifikasi pihak-pihak pengguna sudah memberikan atau sudah mendapatkan informasi atau pengakuan sertifikasi tersebut. Pengalaman kami di BLK ketika pelatihan ini kita



kerjasamakan dengan industri, kita koordinasikan ini dengan industri, sejak mulai menyusun kurikulum terus merekrut calon peserta pelatihan sampai dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sudah dilakukan bersama-sama dengan pihak industri sehingga dengan demikian selesai pelatihan mereka langsung diangkat menjadi pegawai atau direkrut menjadi pegawai walaupun harus melalui seleksi perusahaan tersebut. Tetapi pengakuan terhadap sertifikasi sudah diakui oleh Perusahaan-perusahaan.

Terkait dengan .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... di Vietnam sebanyak .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... mendapat medali 10 emas dan medali perak sebanyak 7 serta perunggu 9, inilah prestasi yang bisa diberikan oleh anak-anak tenaga kerja kita seperti kompetitor dalam ASP. Peningkatan anggaran sertifikasi yang paling mencolok di dalam .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... dan Tahun 2015, kalau Tahun 2014 untuk kegiatan sertifikasi targetnya 40.000 tetapi di Tahun 2015 sebanyak 305.000 tenaga kerja yang mau disertifikasi, yang kedua adalah terkait dengan pembentukan LSP pemberian sertifikasi profesi itu Tahun 2014 targetnya 100, sedangkan Tahun 2015 sebanyak 325 LSP ini yang menjadi target kita sehingga penambahan anggaran yang .....(suara rekaman rusak kecil sekali).....

Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan, kami di Dirjen Bina Lattas ada dua kegiatan, yang pertama adalah kegiatan bantuan kepada Lembaga-lembaga pelatihan milik masyarakat dalam bentuk bantuan peralatan yang pertama, peralatan pelatihan terus yang kedua adalah bantuan program untuk pelaksanaan program kepada lembaga pelatihan. Jadi, kami di Dirjen Bina Lattas memang *concern* terhadap bagaimana meningkatkan atau memberdayakan Lembaga-lembaga pelatihan milik masyarakat tersebut yang berjumlah 8066 pelatihan lembaga kerja swasta itu. Nah, kemampuan kami saat ini untuk bantuan peralatan hanya sebanyak 500an sedangkan untuk .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... 400an lembaga.

Terkait dengan pentingnya program-program pemberdayaan masyarakat, di kami juga ada aktivitas pelatihan untuk pembentukan kewirausahaan, kegiatan ini kita sinergikan dengan Direktorat Jenderal Bina Penta karena tugas dan fungsi kami hanya sebatas melakukan pelatihan sedangkan Direktorat Jenderal Bina Penta akan bersinergi dengan kita untuk memberikan paket bantuan pendampingan dan bantuan stimulan untuk usaha. Konsep yang kita kembangkan dalam pengembangan kewirausahaan ini kita akan mencoba bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah berhasil di tingkat UKM sehingga kita pastikan bahwa aktivitas kewirausahaan ini bisa menghasilkan atau bisa memasarkan karena biasanya kalau pelaku-pelaku usaha yang sudah beraktivitas kita kerjasamakan masalah permasalahan sudah dipastikan dia sudah bisa memberikan akses pemasarannya terhadap produk yang dihasilkan oleh kewirausahaan-kewirausahaan yang baru kita bentuk tersebut.

Yang berikutnya, terkait dengan optimalisasi BLK, kita memang berupaya kita gambarkan bahwa dengan pemetaan atau audit BLK yang sudah kita lakukan ada 13% baik 23% dalam kondisi sedang dan 60% kurang lebih masih dalam kondisi buruk, ke depan sesuai dengan

kemampuan yang kami miliki kami akan mencoba mendorong, mengoptimalkan, menghidupkan BLK-BLK pemerintah daerah yang tersebar di seluruh wilayah tersebut, hanya menjadi masalah kami adalah bagaimana pemerintah daerah juga mempunyai *concern* yang sama, karena pengalaman kita yang kita alami selama ini adalah belum adanya sinergitas yang betul-betul berjalan dengan baik, inilah yang menjadi perhatian kami ke depan akan kita bicarakan secara intens dengan pemerintah daerah terkait dengan BLK yang memang mau kita optimalkan secara bertahap. Jadi, kalau bahasa terangnya kalau pemerintah daerah tidak *concern* kita juga tidak akan memberikan upaya-upaya perbantuan tetapi BLK-BLK yang *concern*lah yang akan kita berikan bantuan. Nah, selebihnya juga kita akan mencoba memetakan BLK-BLK tersebut fokus kepada program-program yang memang menjadi prioritas pengembangan wilayahnya daerah masing-masing. Jadi, mungkin setidaknya sama program antara satu BLK dengan BLK yang lain di wilayah-wilayah yang berbeda, ini yang selalu kita petakan dan .....(suara rekaman rusak kecil sekali).....

Berkaitan dengan pengembangan *home* industri seperti yang tadi sudah kami lakukan, seperti yang ada potensi-potensi di daerah seperti yang tadi Bapak Roberth sampaikan misalnya di daerah tertentu ada potensi komunitas yang memang bisa dilakukan di penambahan lainnya, dengan bantuan hasil pengolahan pertanian, kami bisa memberikan program-program, terkait dengan hal tersebut misalnya dengan pengembangan kewirausahaan tersebut, jadi itu upaya-upaya bisa kita lakukan ke depan, betul-betul kegiatan pelatihan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dan bisa berkembang masyarakatnya. Terkait dengan TKI Purna kami juga sudah memetakan sebagai misal di Tulung Agung kita mendorong BLK tersebut untuk memberikan perhatian kepada TKI-TKI Purna dengan paket-paket kewirausahaan, jadi akses pemasaran, akses permodalan itu diberikan pendampingan oleh kami melalui kerja sama dengan Lembaga-lembaga keuangan dan terkait dengan teknik bagaimana memasarkan produk sudah kita kembangkan melalui fasilitas internet. Terkait dengan pertanyaan Pak Khaidir di Lhokseumawe kami dengan BLK .....(suara rekaman rusak kecil sekali)..... sudah melakukan penjajagan beberapa waktu yang lalu dan kebetulan di tahun-tahun kemarin juga sudah kita komunikasikan, yang menjadi masalah disana adalah belum adanya satu kejelasan status di antara dua pemerintah daerah tersebut Pak, kalau misalnya bisa dibantu ketika itu bisa diselesaikan antara Lhokseumawe dan Aceh Utara kami sudah bisa masuk untuk melakukan bantuan-bantuan selagi status tersebut belum *clear* kami khawatir itu akan menjadi tetapi In Shaa Allah Pak akan kami komunikasikan terus kalau ada perkembangan lebih lanjut Pak.

Terkait dengan sinergitas antara pelatihan dan pendapatan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ke depan upaya-upaya pelatihan dengan Direktorat Jenderal Bina Lattas dan Bina Penta kita intenskan sinerginya, program-programnya dengan harapan bahwa apa yang kami lakukan betul-betul punya manfaat terhadap masyarakat. Terkait dengan TKI LM, TKI LM target yang kita berikan sertifikasinya hanya sebesar 144 ribu mengingat untuk TKI yang ke Timur Tengah sementara kan di

moratorium, jadi yang kita lakukan adalah sasaran untuk yang diberikan sertifikasi.

Kira-kira itu Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Dirjen Bina Penta dan Dirjen Bina Lattas yang telah memberikan respon terhadap pendalaman yang telah disampaikan oleh Para Anggota.

Yang terakhir, yaitu menyimpulkan pokok-pokok, hal-hal yang telah kita bicarakan hampir 4 jam, saya tujukan dulu kepada Bapak, Ibu Anggota Komisi IX DPR RI untuk mendapatkan koreksi, masukkan dan sebagainya. Setelah mendapatkan penjelasan dari dua eselon 1 maka Komisi IX DPR RI dapat memahami hal-hal sebagai berikut :

1. APBN Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2015 sebesar Rp.853.208.025.000,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*). Dirjen Bina Penta mendapatkan tambahan anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.220 miliar.
2. APBN Dirjen Bina Lattas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 Rp.1.347.812.823.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Dirjen Bina Lattas mendapatkan alokasi anggaran tambahan Tahun 2015 dalam RAPBN Tahun 2015 sebesar Rp.85 miliar.
3. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menyampaikan rincian dan alokasi usulan program dan kegiatan dalam RAPBNP Tahun 2015 kepada Komisi IX DPR RI dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh masukkan dan saran Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk :
  - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran terutama untuk program kegiatan perluasan dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan revitalisasi BLK, BLKLN.
  - b. Lebih fokus pada program pemberdayaan masyarakat dengan indikator yang jelas dan terukur sehingga tepat sasaran. Untuk kedua hal tersebut dilakukan dengan melibatkan representasi Anggota Komisi IX DPR RI berdasarkan aspirasi daerah.
5. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan RAPBNP Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Itulah kira-kira draft kesimpulan yang telah kita susun, saya minta masukkan dari Bapak dan Ibu Anggota. Cukup?

Ada satu hal yang tidak masuk dalam kesimpulan ini tetapi perlu Bapak Dirjen Bina Lattas itu tadi tulis BLK di seluruh Indonesia, mungkin BLK yang dimiliki oleh Kementerian Pusat, BLK yang dimiliki oleh swasta juga mungkin ada supaya Kawan-kawan memiliki informasi yang lengkap soal *list* BLK, tidak masuk dalam kesimpulan tetapi perlu menjadi catatan.

**F-GERINDRA (KHAIDIR) :**

Pimpinan, sedikit tambahan.

Jadi, mohon perhatian Pak Dirjen Bina Lattas bahwa tadi juga disampaikan bahwa setiap daerah itu tidak semua mendapat prioritas untuk di *back up* oleh APBN tergantung kepada keseriusan pemerintah daerah dan ini juga tolong ditandai daerah-daerah mana saja yang akan menjadi prioritas sebagaimana penjelasan Bapak tadi dalam daftar yang disampaikan nanti.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Ya untuk catatan. Cukup ya?

Oh Ibu Okky silakan.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Saya lupa di poin yang ke berapa tetapi tadi diminta kepada Direktorat Bina Penta dan Bina Lattas untuk menyerahkan secara detail mengenai target, program, apakah itu perlu dikasih *date line* nya kapan, diserahkan kepada kita begitu Pimpinan?

**KETUA RAPAT :**

Besok kita rencana Raker, karena eselon 1 Kementerian ini sudah selesai, tentu Bapak dan Ibu sekalian seyogyanya mendapatkan rincian itu sebelum sore besok, sebelum Raker dengan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi, apa yang diminta oleh Anggota, kami juga sudah ingatkan eselon 1 yang lain agar rincian itu disampaikan kepada Komisi sebelum Raker dengan Pak Menteri. Itu Ibu Okky, cukup ya? Kami persilakan kepada Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas apa ada usul terhadap draft kesimpulan ini?

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Pimpinan.

Kami dari Direktorat Jenderal Bina Penta mengucapkan terima kasih dan mohon untuk poin 1 ada koreksi mungkin sehingga total RAPBNP Tahun 2015, jadi bukan RAPBNP tetapi total anggaran.

**KETUA RAPAT :**

Tolong disempurnakan redaksinya supaya tidak salah paham orang baca nanti, ya saya kira betul, saya kira yang dibawah juga sama ya?

**DIRJEN BINA PENTA :**

Dan poin 4 Pimpinan. Nomenklaturnya saja Pimpinan, *Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.*

**KETUA RAPAT :**

Tolong disempurnakan.

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER. PARASONG, SH.,M.Hum) :**

Pimpinan, itu apakah sudah mendapat SK Presiden mengenai nomenklatur itu?

**DIRJEN BINA PENTA :**

Sudah Pak, sesuai dengan Perpres.

**KETUA RAPAT :**

Cukup?  
Dari Bina Lattas?

**DIRJEN BINA LATTAS :**

Cukup.

**KETUA RAPAT :**

Baik,

**Bapak, Ibu sekalian.**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* draft kesimpulan ini kita sahkan menjadi kesimpulan antara Komisi IX DPR RI dengan Direktorat Jenderal Bina Lattas dan Bina Penta.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, sebelum kita akhiri kami persilakan kepada Dua Direktorat Jenderal untuk menyampaikan *closing remark*, Bina Penta dulu.

**DIRJEN BINA PENTA :**

Terima kasih Bapak dan Ibu Pimpinan, Anggota Dewan Komisi IX DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas pendalaman pada pagi hari ini dan terima kasih juga atas saran dan kami akan berusaha untuk segera memenuhi apa yang menjadi catatan pada hari ini dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon kiranya agar dapat

mengawasi seluruh program yang akan dilakukan oleh Direktorat Bina Penta Naker.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak.

**DIRJEN BINA LATTAS :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan serta Ibu, Bapak Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati.

Kami atas nama Direktorat Jenderal Bina Lattas mengucapkan terima kasih atas semua masukan, semua saran dan terkait dengan hal-hal yang perlu kami lengkapi sesegera mungkin akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir mungkin terkait dengan data yang diperlukan oleh BLK segera akan kami sampaikan karena pada prinsipnya kami sedang berupaya untuk melengkapi itu. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

**Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.**

Tadi kita dengar semangat dari Komisi IX DPR RI akan memberikan dukungan yang kuat untuk keberhasilan pelaksanaan program di daerah Dapil masing-masing. Oleh karena itu, kami harapkan ini bukan merupakan sebuah beban tetapi merupakan sebuah kemitraan antara Komisi IX DPR RI dengan Bapak, Ibu sekalian dalam melaksanakan program-program yang telah kita bicarakan.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* RDP pada pagi dan siang hari ini kita cukupkan dan kita akhiri.

*Wabilahi Taufik Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.55 WIB)**

**Jakarta, Februari 2015**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Ttd,**

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE  
NIP. 196707171993031006**

